

MAJALAH BANK INDONESIA

BICARA

**LCS
MENJAGA
RUPIAH
MEMACU
EKSPOR**

**Yuk,
Berinvestasi
Sekaligus
Bantu Negeri**

"SATU BAHASA"

**MAJUKAN SISTEM
PEMBAYARAN
NASIONAL**



www.majalahbicara.com

SCAN QR CODE UNTUK
VERSI DIGITAL DAN IKUTI
KUIS BERHADIAH MENARIK



BANK INDONESIA
BANK SENTRAL REPUBLIK INDONESIA



BANK INDONESIA

Di Usia 68, **Bank Indonesia**
Terus Bertransformasi Menjadi
yang Terbaik di Emerging Market
& Siap Berkontribusi Nyata untuk
Pemulihan Perekonomian Indonesia.



www.bi.go.id



[BankIndonesiaOfficial](https://www.facebook.com/BankIndonesiaOfficial)



[@bank_indonesia](https://twitter.com/bank_indonesia)



[bank_indonesia](https://www.instagram.com/bank_indonesia)



[Bank Indonesia Channel](https://www.youtube.com/BankIndonesiaChannel)



Contact Center : 131

MENGINTEGRASIKAN SISTEM PEMBAYARAN DIGITAL

Transaksi digital sudah menjadi bagian dari keseharian kita. Memesan makanan, belanja beragam kebutuhan, membayar tiket pesawat, order kendaraan untuk transportasi, hingga membeli produk asuransi dan investasi, bisa dilakukan dengan mudah melalui ponsel, tablet, maupun laptop. Semua itu tidak lepas dari peran teknologi Application Programming Interface (API).

API memungkinkan dua aplikasi atau lebih untuk saling berkomunikasi, misalnya antara *marketplace* dengan bank atau *e-wallet*. Namun, selama ini, protokol komunikasi itu tidak terstandar. Sederhananya, “bahasa” yang digunakan beragam. Akibatnya, sistem pembayaran digital menjadi terfragmentasi. Ada *marketplace* yang hanya bisa bekerja sama dengan bank dan *e-wallet* tertentu karena “bahasa” mereka sama, tapi tidak bisa memperluas kerja sama dengan pihak lain karena berbeda “bahasa”.

Tepat pada 17 Agustus 2021, bersamaan dengan HUT Kemerdekaan RI, Bank Indonesia (BI) meluncurkan Standar Nasional Open API Pembayaran (SNAP). SNAP menstandarkan berbagai aspek dalam API pembayaran. Dengan demikian, ada “bahasa nasional” yang bisa dipakai semua pihak. Sistem pembayaran digital pun menjadi lebih terintegrasi, serta memiliki tingkat interoperabilitas dan interkoneksi yang tinggi.

SNAP, yang akan diterapkan secara bertahap, memberi keuntungan baik bagi para pelaku di sistem pembayaran maupun bagi masyarakat. Para pelaku,

seperti bank, *fintech*, *e-commerce*, dan *e-wallet* bisa memperluas kerja sama dan mengembangkan produk-produk yang lebih inovatif. Di sisi lain, masyarakat akan memiliki lebih banyak pilihan dalam bertransaksi digital. Selain itu, prosesnya juga semakin aman karena SNAP mengutamakan perlindungan konsumen.

SNAP menjadi salah satu langkah BI mewujudkan sistem pembayaran yang cepat, mudah, murah, aman, dan andal, sesuai dengan Visi Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2025. Ke depan, BI akan terus mendukung pengembangan sistem pembayaran nasional demi memajukan perekonomian bangsa.

Erwin Haryono

KEPALA DEPARTEMEN
KOMUNIKASI
BANK INDONESIA



DAFTAR ISI

03 SALAM

04 DAFTAR ISI

05 EDITORIAL

06 LENSA BICARA

Cinta, Bangga, dan Paham Rupiah

10 SOROT

SNAP, "Satu Bahasa" Demi Majukan Sistem Pembayaran Nasional

18 OPINI

Standardisasi *Open API* Pembayaran



21 KOLOM

Mewujudkan Sistem Pembayaran Andal di Era Digital

26 TERKINI

LCS, Menjaga Rupiah Memacu Ekspor

30 TRENDING

Transparansi SBDK, Agar Bunga Kredit Semakin Turun

34 KIAM

Yuk, Berinvestasi Sekaligus Bantu Negeri

37 INFOGRAFIK

Penarikan Uang Rupiah Khusus 1970-1990



38 DEDIKASI

Menimba Ilmu Agama, Mengasah Jiwa Wirausaha

42 HISTORIA

BI, Bank Sentral Buah Perjuangan Bangsa

46 TRAVELISTA

Jelajah Wisata Cirebon - Kuningan

50 CITA RASA

Eksotisme Nusantara dalam Atmosfer Kolonial

54 TAMU KITA

Semakin Digital, Semakin Inklusif

58 PERISTIWA

64 CELOTEH

65 KUIS

65 KRIUK!

66 KOMIK BANG SEN

Lebih Mantap dengan SNAP



FOTO COVER SHUTTERSTOCK

PENANGGUNG JAWAB: **ERWIN HARYONO** • PEMIMPIN REDAKSI: **JUNANTO HERDIAWAN**
• REDAKSI PELAKSANA: **EDHI RAHMANTO HIDAYAT, CECEP RIDWAN, MIRZA AFIFA, AGUSTIARA PURBA, AFIF ANGGORO PRASETYO** • KONTRIBUTOR: **DEPARTEMEN KEBIJAKAN SISTEM PEMBAYARAN, DEPARTEMEN KEBIJAKAN MAKROPRUDENSIAL, DEPARTEMEN PENGEMBANGAN PASAR KEUANGAN, DEPARTEMEN PENGELOLAAN UANG RUPIAH**

KONSULTAN: **MEDIA INDONESIA PUBLISHING**
ALAMAT REDAKSI: **DEPARTEMEN KOMUNIKASI BANK INDONESIA**
JL. M. H. THAMRIN NO.2, JAKARTA PUSAT 10350
CONTACT CENTER: **(021) 151** E-MAIL: **bicara@bi.go.id**

AGAR TRANSAKSI DIGITAL SEMAKIN LANCAR

Pernah beli barang di *marketplace*, mau bayar dengan *e-wallet*, tapi tidak bisa? Penyebabnya bukan karena saldo tak cukup, tapi *marketplace* tersebut belum bekerja sama dengan *e-wallet* andalan kita. Bisa jadi, keduanya bukan tak mau bekerja sama, tapi tak bisa bekerja sama, karena API yang mereka gunakan tidak kompatibel.

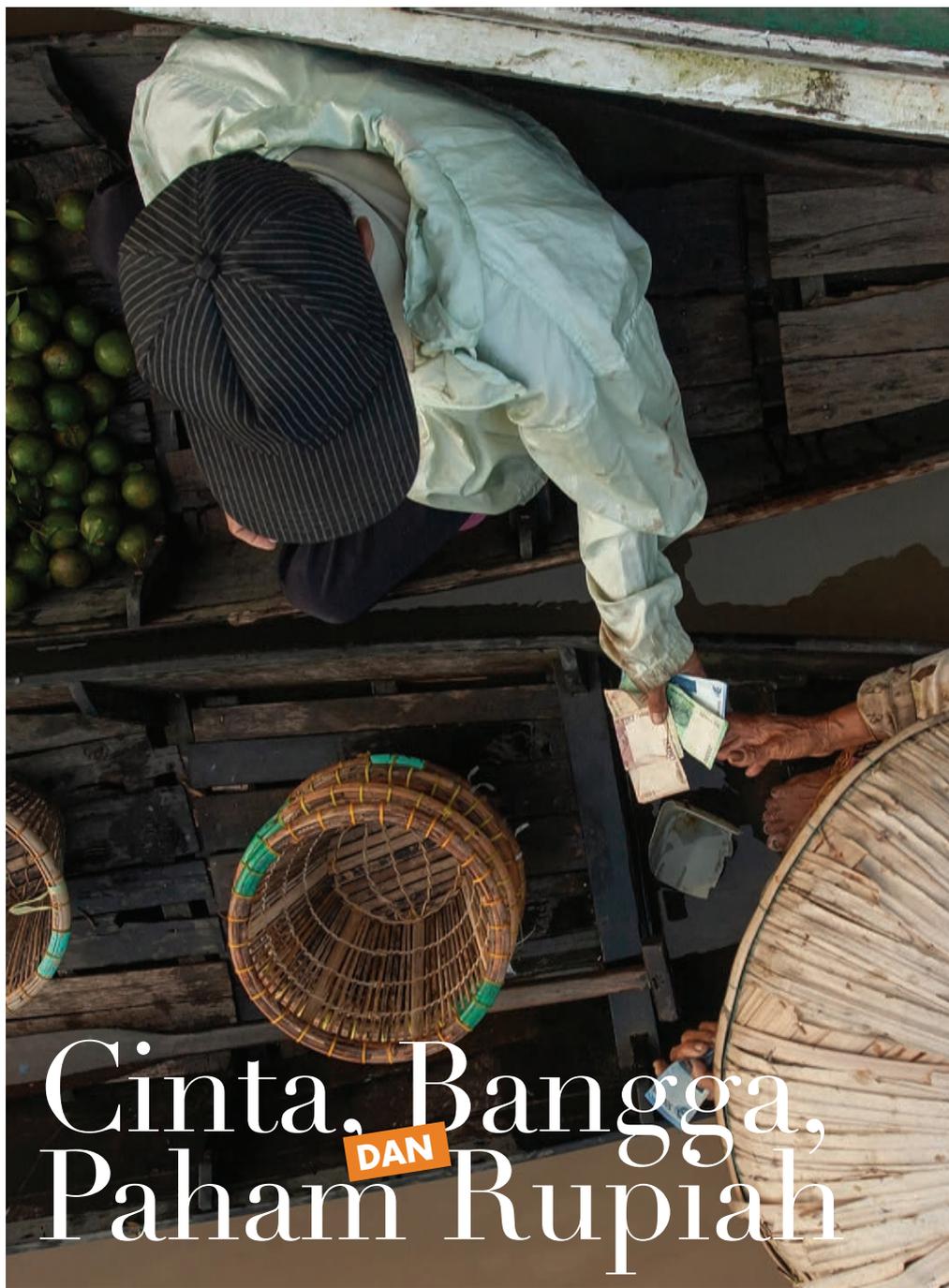
API alias *application program interface* adalah teknologi yang memungkinkan dua aplikasi bisa berkomunikasi. Selama ini, belum ada standar API di bidang pembayaran. Karena itu, API yang digunakan bank, *marketplace*, *e-wallet*, dan para pelaku lain tidak selalu kompatibel satu sama lain. Tapi, tak lama lagi, kejadian seperti ini bisa dihindari. Sebab, Bank Indonesia (BI) sudah meluncurkan Standar

Nasional Open API Pembayaran (SNAP). Dengan SNAP, transaksi digital pun akan lebih lancar dan aman. Penasaran? Simak ulasannya dalam Rubrik Sorot.

Meningkatkan kelancaran transaksi digital merupakan bagian dari upaya BI membangun sistem pembayaran yang andal. Hal itu sangat penting untuk mendukung pemulihan perekonomian bangsa. Terkait pemulihan ekonomi, pemerintah membutuhkan dukungan dari semua pihak, termasuk kita semua. Nah, ada sebuah cara membantu pemerintah yang juga mendatangkan keuntungan finansial buat kita. Apakah itu? Baca detailnya di Rubrik Kiat ya.

Tentu saja, selain Sorot dan Kiat, masih ada rubrik-rubrik lain yang juga menarik untuk disimak. Selamat membaca!





Cinta, Bangga, Paham Rupiah

DAN

**RUPIAH TAK HANYA
BERFUNGSI SEBAGAI
ALAT PEMBAYARAN.
RUPIAH JUGA MENJADI
SIMBOL KEDAULATAN DAN
PEMERSATU BANGSA.**

Dua pedagang bertransaksi menggunakan Rupiah dari atas perahu mereka. Penyaluran Rupiah dilakukan Bank Indonesia hingga ke wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) untuk memastikan Rupiah memberi manfaat bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Sebagai warga yang cinta Tanah Air sudah semestinya kita juga mencintai mata uang Indonesia. Cinta pada Rupiah dapat diwujudkan dengan mengenali keaslian, menjaga, merawat, dan menggunakannya dengan bijak.

Untuk mengenali keaslian Rupiah, caranya mudah saja. Pertama, lihat dengan seksama. Warna Rupiah yang asli terang dan jelas. Terdapat benang pengaman seperti anyaman. Kedua, raba bagian nominal uang dan lambang Garuda, Rupiah asli akan terasa kasar. Jika diterawang di bawah sorot lampu atau matahari, akan terlihat tanda air (*watermark*) bergambar pahlawan dan ornamen (*electrotype*).

Selain mencintai, kita juga harus bangga dengan Rupiah. Rupiah itu simbol kedaulatan dan alat pemersatu bangsa, serta satu-satunya alat pembayaran yang sah di Indonesia. Dengan adanya Rupiah, seluruh masyarakat di penjuru Nusantara lebih dipersatukan. Dengan Rupiah, transaksi di berbagai daerah pun tak masalah.

Cinta dan bangga saja belumlah cukup. Kita juga perlu memahami bahwa Rupiah berperan penting dalam perekonomian negara. Nilai tukar Rupiah yang stabil akan merepresentasikan kekuatan ekonomi Indonesia di kancah internasional. Kita bisa membantu mewujudkan kestabilan Rupiah dengan selalu menggunakannya saat bertransaksi.

Begitu pentingnya peran dan makna Rupiah, Bank Indonesia pun selalu menggenarkan kampanye Cinta, Bangga, dan Paham Rupiah.



Menggunakan dompet berbentuk persegi panjang lebih baik untuk menyimpan uang kertas Rupiah sehingga tidak terlipat dan lebih mudah dikeluarkan saat bertransaksi.

Jangan tinggalkan uang logam. Meskipun nilainya kecil, uang logam merupakan alat transaksi yang sah di seluruh Indonesia.





Teller bank dan nasabah melakukan transaksi menggunakan uang kertas Rupiah. Alih-alih distapler, sebaiknya gunakan karet atau label khusus untuk menyatukan Rupiah dalam jumlah tertentu. Dengan demikian, Rupiah tetap utuh, tak berlubang maupun sobek.

Dalam kondisi gelap dan dengan bantuan sinar ultraviolet (UV), kita dapat mengenali keaslian Rupiah. Beberapa ornamen dan gambar hasil cetak *invisible ink* akan memendar dalam satu atau beberapa warna apabila dilihat dengan sinar UV. Selain itu, nomor seri juga akan berubah warna bila dilihat di bawah sinar UV, dari merah menjadi jingga untuk nomor seri bagian atas dan hitam menjadi hijau untuk nomor seri bagian bawah.





SNAP

“Satu Bahasa”

DEMI MAJUKAN SISTEM PEMBAYARAN NASIONAL

SNAP AKAN MEMUDAHKAN KERJA SAMA ANTARPELAKU INDUSTRI SISTEM PEMBAYARAN. PILIHAN LAYANAN PEMBAYARAN PUN AKAN LEBIH BERAGAM. TAK HANYA ITU, PERLINDUNGAN KONSUMEN JUGA SEMAKIN KUAT.

Belanja *online* menjadi kelaziman yang dilakukan banyak orang di masa kini. Begitu praktisnya, belanja *online* pun menjadi sangat menyenangkan. Tinggal pilih barang di *marketplace*, bayar via transfer melalui *mobile banking* maupun *e-wallet*, klik-klik, beres deh!

Semua kemudahan itu bisa terwujud berkat teknologi Application Programming Interface (API) yang menghubungkan *marketplace*, bank, dan *e-wallet*. API

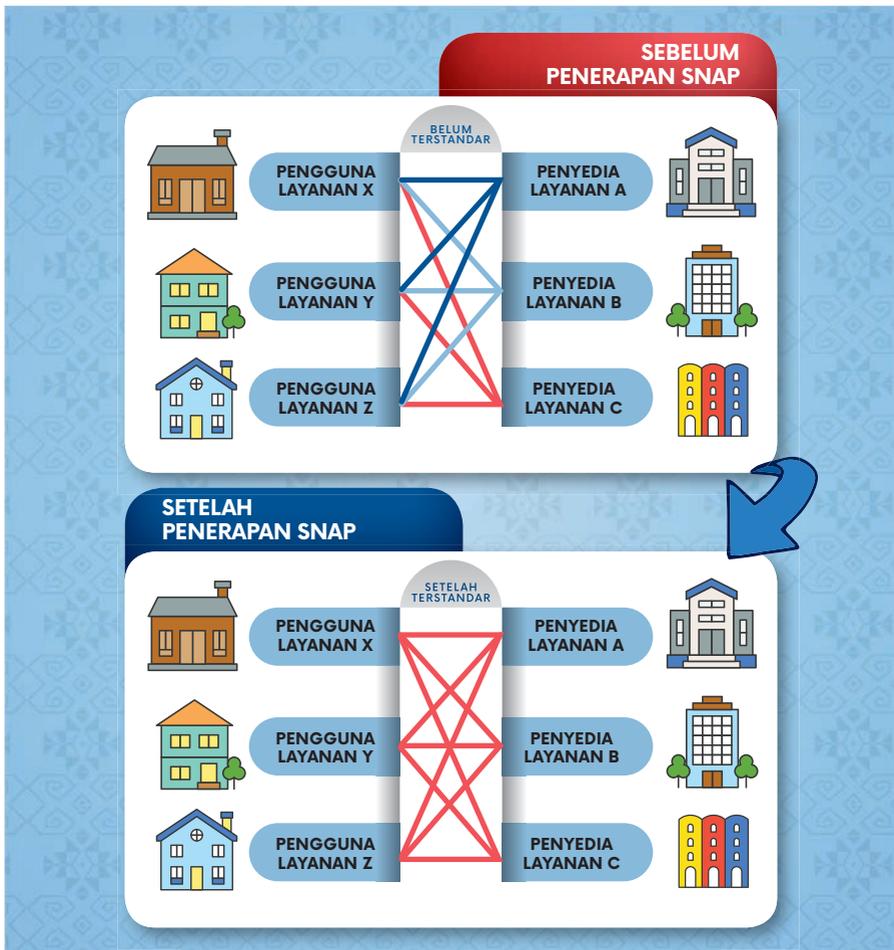
adalah antarmuka (*interface*) yang yang memungkinkan dua atau lebih program aplikasi untuk saling terhubung. Dengan begitu, urusan belanja *online*, membayar ragam tagihan, memesan kendaraan, hingga berinvestasi melalui aplikasi bisa dilakukan dengan lancar.

Terkait dengan API di bidang pembayaran digital, bersamaan dengan perayaan HUT RI 17 Agustus 2021 lalu, Bank Indonesia (BI) meluncurkan Standar Nasional Open API Pembayaran (SNAP). Dengan SNAP, ke depan, pembayaran digital akan semakin aman, lebih banyak pilihan, dan inovatif.

Kok bisa?

Sebelum membahas SNAP, mari kita lihat apa yang terjadi di ‘belakang layar’ saat kita berbelanja *online*. Saat kita membeli barang di sebuah *marketplace* dan membayarnya dengan saldo tabungan di Bank A, ada sebuah komunikasi antara *marketplace* dengan Bank A bahwa kita akan membeli barang dengan harga sekian Rupiah. Lalu, Bank A akan mengecek saldo. Jika saldo cukup, pembayaran pun dilakukan. Komunikasi antara *marketplace* dan bank itu dilakukan melalui API.

Selama ini, API umum digunakan untuk



komunikasi antara bank dengan *marketplace*, *payment gateway*, *aggregator*, *e-wallet*, dan lain sebagainya. Namun, komunikasi itu belum terstandar. Ibaratnya, masing-masing menggunakan “bahasa” yang berbeda-beda. Bank A dengan *marketplace* B menggunakan “bahasa Jawa”, Bank C dengan *marketplace* D menggunakan “bahasa Batak”. Jadi, belum ada “bahasa nasionalnya”.

SNAP berfungsi untuk standardisasi protokol komunikasi tersebut secara nasional. Dengan protokol komunikasi yang terstandar, nantinya Bank A bisa berkomunikasi (bekerja sama) dengan *e-commerce* C dan D, Bank B pun demikian, karena semua menggunakan bahasa yang sama. Jadi, ada “bahasa nasional” yang memungkinkan semua pihak bisa saling terhubung. Sistem pembayaran pun menjadi lebih efisien, tidak lagi terfragmentasi. Tanpa fragmentasi, masyarakat akan diuntungkan karena memiliki lebih banyak pilihan dalam melakukan transaksi.

IMPLEMENTASI BSPI 2025

SNAP merupakan implementasi dari Visi Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2025. Utamanya visi kedua, mendukung digitalisasi perbankan, dan visi ketiga yakni menjamin *interlink* antara *fintech* dengan perbankan.

Ada tiga tujuan SNAP. Pertama, mendorong integrasi, interoperabilitas, interkoneksi antarpelenggara *open API* sehingga meningkatkan efisiensi sistem pembayaran. Kedua, mendorong *interlinkage* antara penyedia jasa pembayaran (PJP) bank, PJP nonbank, dan non-PJP. Ketiga, SNAP mengurangi fragmentasi industri serta mendorong



akselerasi digitalisasi ekonomi dan keuangan di Indonesia, antara lain dengan meningkatkan kemudahan dalam melakukan integrasi atau kerja sama.

STANDAR TEKNIS DAN TATA KELOLA

SNAP disusun oleh BI bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI) sejak setahun lalu. Standar ini telah ditetapkan oleh BI melalui Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia No.23/10/KEP.GBI/2021. SNAP mencakup Standar Teknis dan Keamanan, Standar Data, serta Spesifikasi Teknis SNAP. Total, SNAP mencakup standar untuk 22 API dengan 72 *sub-service* API yang dikategorikan dalam 5 kelompok yaitu Registrasi, Informasi Saldo, Informasi Riwayat Transaksi, Transfer Kredit, dan Transfer Debit.

Selain itu, SNAP juga mencakup Pedoman Tata Kelola dalam penyelenggaraan keterhubungan *open API* pembayaran. Pedoman ini meliputi perlindungan konsumen, perlindungan data, persyaratan kehati-hatian bagi penyedia layanan dan pengguna layanan, serta kontrak. Hal ini penting sekali bagi

masyarakat karena memberi perlindungan, misalnya ketika ada kebocoran data, apa yang harus dilakukan bank, *fintech*, *marketplace*, semua diatur dalam standar tata kelola.

Dalam menyusun SNAP, BI bekerja sama dengan pihak industri yang tergabung dalam Working Group (WG) nasional, anggotanya ada 16 yang berasal dari pihak perbankan, PJP nonbank, *aggregator*, *e-commerce*, dan sejumlah pelaku lain. Mereka disebut kelompok *first mover*. Ditargetkan, untuk kelompok tersebut, implementasi SNAP dilakukan paling lambat 30 Juni 2022. Selanjutnya, untuk para pelaku lain atau *next mover* ditargetkan menerapkan SNAP paling lambat pada 31 Desember 2022.

DEVELOPER SITE

Dalam proses implementasi SNAP, BI menyediakan *developer site*. Website yang saat ini dikelola BI itu memiliki tiga fungsi. Pertama, sebagai sarana publikasi standar teknis dan tata kelola. Kedua, menjadi tempat menguji API yang dimiliki para pelaku apakah sudah sesuai dengan standar atau belum, juga menguji apakah kerja sama antarpelaku melalui API tertentu bisa berjalan baik atau tidak. Ketiga, sebagai direktori yang memuat pihak mana saja yang sudah memenuhi standar sesuai SNAP. Direktori ini memudahkan para pelaku

untuk menjalin kerja sama. Misalnya, sebuah bank hendak bekerja sama dengan salah satu *fintech* atau *marketplace*. Bank tersebut bisa mengecek apakah *fintech* atau *e-commerce* itu sudah sesuai SNAP atau belum.

Jadi, pengembangan API pembayaran menggunakan *developer site* ini mencakup empat tahap. Pertama, pengujian untuk menentukan apakah API yang dikembangkan sudah sesuai SNAP atau belum. Kedua, pengujian fungsional untuk mengetahui apakah API tersebut sudah berjalan atau belum. Ketiga, verifikasi untuk memastikan kembali kesesuaian API yang dikembangkan dengan SNAP dan lolos uji fungsional. Keempat, mendapat persetujuan BI.

Dengan fungsinya yang begitu strategis, SNAP diyakini akan memberikan dampak besar bagi akselerasi digitalisasi ekonomi dan keuangan Indonesia. Karenanya, tak berlebihan jika Gubernur BI, Perry Warjiyo, menyebut SNAP sebagai kado istimewa untuk perayaan HUT RI 2021.

“Inilah kado terindah bagi negeri ini, sekaligus sebuah *legacy* untuk generasi yang akan datang. SNAP akan mengintegrasikan dan menginterkoneksi berbagai layanan transaksi dalam sistem pembayaran, bagi kemajuan keuangan dan ekonomi negeri ini,” ujar Perry.

Proses Pengembangan API Pembayaran



DUKUNGAN PARA STAKEHOLDERS

ATAS NAMA Perbanas kami mengucapkan selamat atas peluncuran SNAP. SNAP menjadi sangat penting karena meningkatkan digitalisasi khususnya di sektor keuangan dan perbankan, serta untuk memajukan sistem pembayaran yang terintegrasi, memiliki interkoneksi dan interoperabilitas luas. Kami yakin, dengan penerapan standar nasional dalam digitalisasi sistem pembayaran, BI dapat mengoptimalkan inovasi layanan perbankan dengan tetap menjaga stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan, dan tentunya mendorong pemulihan ekonomi nasional. Perbanas sangat mengapresiasi dan mendukung kebijakan strategis BI yang bertujuan meningkatkan penguatan digitalisasi sistem pembayaran yang cepat, mudah, murah, aman, dan andal.



Kartika Wirjoatmodjo
KETUA PERHIMPUNAN BANK NASIONAL
(PERBANAS)

Salamat atas peluncuran SNAP. ASPI menyambut baik dan sepenuhnya mendukung inisiatif strategis tersebut. Merupakan suatu kehormatan bagi ASPI, telah mendapat kepercayaan dari BI untuk turut serta menjadi bagian dalamengejawantahkan Visi Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2025. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada anggota ASPI, sebagai perwakilan industri, yang tidak kenal lelah berpartisipasi dalam Working Group Open API dan telah memberikan kontribusi berharga. Melalui implementasi SNAP, keterhubungan antara

perbankan dan *fintech* akan semakin mudah dan mendorong terciptanya berbagai inovasi untuk membangun ekosistem sistem pembayaran yang terintegrasi, memiliki interoperabilitas, serta semakin cepat, efisien, aman, dan andal. Kami mengajak seluruh anggota ASPI untuk bersama-sama mendukung kesuksesan inisiatif ini, yang merupakan sarana mereformasi *landscape* digitalisasi untuk menuju Indonesia tangguh, Indonesia maju.



Santoso Liem
KETUA ASOSIASI SISTEM PEMBAYARAN
INDONESIA (ASPI)

Aftech mengucapkan selamat dan apresiasi sebesar-besarnya kepada BI atas tercapainya beberapa *milestones* besar dalam BSPI 2025. Sebagai salah

satu mitra strategis BI dalam mencapai target capaian BSPI 2025 dan Blueprint Pengembangan Pasar Uang (BPPU) 2025, kami berkomitmen untuk terus mendukung upaya dan program BI terkait implementasi dan sosialisasi inisiatif BSPI 2025 dan BPPU 2025.

Industri *fintech* menyadari pentingnya standar dalam mendukung implementasi *open API*. Kami telah memberikan masukan melalui ASPI dan kepada BI. Seluruh komitmen dan dukungan terhadap implementasi BSPI 2025 dan BPPU 2025 kami harapkan dapat mendorong terciptanya sistem pembayaran nasional yang cepat, mudah, murah, aman dan andal melalui pengembangan serta pemanfaatan inovasi dan teknologi pada *fintech*, sehingga pada akhirnya dapat memberdayakan masyarakat yang masih mengalami keterbatasan akses layanan jasa keuangan, sehingga mereka dapat mengoptimalkan potensi ekonominya bagi pertumbuhan Indonesia yang inklusif.

Pandu Patria Sjahrir
KETUA ASOSIASI FINTECH INDONESIA
(AFTECH)



FIRST MOVER

1

PJP & Non PJP penyusun
SNAP: 30 Juni 2022

Pengintegrasian:

Pengguna layanan yang
merupakan anggota Work-
ing Group Nasional: 30 Juni
2022

2

Pengguna layanan lainnya
(mitra *existing*):
30 Juni 2024

Pengguna layanan UMKM
dan lembaga nirlaba (mitra
existing): 30 Juni 2025

NEXT MOVER

1

PJP *existing* yang telah me-
nyelenggarakan API pemba-
yaran: 31 Desember 2022

Pengintegrasian oleh
PJP *existing* yang telah
menyelenggarakan API
pembayaran:

2

Pengguna layanan (mitra
existing): 30 Juni 2024

Pengguna layanan UMKM
dan lembaga nirlaba (mitra
existing): 30 Juni 2025

3

PJP yang telah atau dalam
proses perizinan dan/atau
persetujuan pada saat PADG
SNAP berlaku: 31 Desember
2022

4

PJP yang mengajukan proses
perizinan dan/atau persetu-
juan menggunakan API pem-
bayaran setelah PADG SNAP
berlaku: 31 Desember 2022

Jadwal Penerapan SNAP



KETERANGAN

PJP: PENYEDIA JASA PEMBAYARAN

PADG: PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR



STANDARDISASI *OPEN API* PEMBAYARAN

PELUNCURAN SNAP OLEH BANK INDONESIA MENJADI SALAH SATU WUJUD DUKUNGAN BANK SENTRAL UNTUK KEMAJUAN EKONOMI DAN KEUANGAN DIGITAL INDONESIA.



DR. ANA SRIEKANINGSIH, S.E., M.M.
DOSEN STIE BULUNGAN TARAKAN

FOTO SHUTTERSTOCK; DOK. DR. ANA SRIEKANINGSIH, S.E., M.M.

Teknologi digital telah mengisi berbagai aspek: sosial, budaya, politik, dan ekonomi. Pada aspek ekonomi, dengan teknologi digital, perusahaan dapat memperluas jangkauan pasarnya, karena konsumen bisa bertransaksi melalui internet tanpa dibatasi tempat dan waktu. Teknologi digital juga

memunculkan bisnis dan layanan baru dalam sistem pembayaran, seperti *internet banking*, *SMS banking* dan *e-commerce*.

Berbagai data menunjukkan, aspek ekonomi sangat terpengaruh oleh teknologi digital, khususnya di bidang *e-commerce* yang mempunyai dampak langsung terhadap pertumbuhan *fintech* dan sistem pembayaran digital. Perkembangan ini menjadikan perusahaan yang bergerak di bidang sistem pembayaran dan layanan jasa keuangan bertumbuh cepat. Laporan *e-Conomy SEA 2019* yang diluncurkan Google (<https://mediacyber.com/2019/10/10/e-conomy-sea-2019>) menyebutkan, Indonesia merupakan salah satu negara di Asia Tenggara yang memiliki pertumbuhan tercepat di bidang ekonomi digital.

Kuangan digital mempercepat layanan di dunia bisnis. Berbagai jenis transaksi pembayaran yang dilakukan, mulai dari pengelolaan aset, pengumpulan dana, hingga pinjaman bisa diatur dan dipercepat menggunakan teknologi tersebut.

Bank Indonesia (BI) yang memiliki kewenangan kebijakan sistem pembayaran memberikan dukungan serta mendorong inovasi ekonomi dan keuangan digital untuk memperkuat daya saing dan kepentingan nasional, serta mempersempit kesenjangan di masyarakat. BI pun telah menyusun arah kebijakan sistem pembayaran Indonesia melalui Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2025: Menavigasi Pembayaran Nasional di Era Digital.

Pada perayaan HUT ke-76 Kemerdekaan RI 17 Agustus 2021 lalu, BI mengangkat tema Keuangan Digital Bagi Pertumbuhan dan Percepatan Ekonomi Negeri. Dalam rangkaian perayaan itu, BI meluncurkan Standar Nasional Open API Pembayaran (SNAP). Peluncuran tersebut menandai dimulainya standarisasi *open API* pembayaran nasional.

BI juga telah menerbitkan ketentuan standarisasi dalam penyelenggaraan sistem pembayaran salah satunya melalui Peraturan Anggota Dewan Gubernur (PADG) Nomor 23/15/PADG/2021 tentang Implementasi Standar Nasional Open API

Pembayaran. PADG ini menjadi landasan hukum dalam penerapan SNAP.

Jauh sebelum BI menetapkan standarisasi *open API*, industri sudah ambil langkah terlebih dulu dengan membuat *open API* versi masing-masing. *Open API* adalah komunikasi antarpelaku melalui sebuah *application program interface* atau API. Komunikasi yang dimaksud antara lain komunikasi antara bank dengan *e-commerce*, uang elektronik, *payment gateway*, dan lain sebagainya. Namun, praktik yang terjadi selama ini, komunikasi antara bank satu dengan yang lain, dengan *aggregator* dan *payment gateway* lain belum ada standarnya, protokol komunikasinya berbeda-beda.

Dorong Inovasi

Implementasi SNAP dinilai sebagai salah satu tahapan penting dalam mengakselerasi *open banking* di area sistem pembayaran. Penerapan *open banking* merupakan suatu kebutuhan untuk mendukung inovasi dan kompetisi, serta memperluas akses keuangan masyarakat. Selain itu, juga untuk mendorong transformasi digital oleh perbankan sebagai lembaga utama dalam ekonomi – keuangan digital. SNAP menjadi bukti bahwa BI mendorong inisiatif *open banking* di area sistem pembayaran.

Hal itu sejalan dengan Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2025 pada visi kedua dan visi ketiga. Visi kedua yaitu, SPI 2025 mendukung digitalisasi perbankan sebagai lembaga utama dalam ekonomi – keuangan digital melalui *open banking* maupun pemanfaatan teknologi digital dan data dalam bisnis keuangan. Visi ketiga yaitu, SPI 2025 menjamin *interlink* antara *fintech* dengan perbankan untuk menghindari *shadow banking* melalui pengaturan teknologi digital (seperti API), kerja sama bisnis, maupun kepemilikan perusahaan.

Peran SNAP

Penerapan SNAP dapat mendorong

interkoneksi, interoperabilitas, dan integrasi dalam penyelenggaraan sistem pembayaran, serta meningkatkan inovasi dan kompetisi untuk kepuasan konsumen. Penerapan SNAP akan membantu mewujudkan ekosistem *open API* pembayaran yang berintegritas dan berdampak positif dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan keuangan digital, dengan tetap memperhatikan upaya mitigasi risiko melalui penerapan standar yang memadai.

SNAP merupakan standar nasional yang ditetapkan BI atas seperangkat protokol dan instruksi yang memfasilitasi interkoneksi antar-aplikasi secara terbuka dalam pemrosesan transaksi pembayaran. SNAP memuat dokumen tentang standar teknis dan keamanan, standar data, dan spesifikasi teknis SNAP; serta pedoman tata kelola SNAP.

Oleh karenanya, dengan adanya SNAP terdapat standar yang sama atau dapat dikatakan terdapat “bahasa nasional” yang dapat digunakan oleh semua pihak untuk saling berkomunikasi.

Dengan demikian, SNAP akan dapat menciptakan industri sistem pembayaran yang sehat, kompetitif, dan inovatif, sehingga dapat menyediakan layanan sistem pembayaran yang efisien dan aman, serta andal bagi masyarakat. Selain itu kebijakan SNAP juga bertujuan untuk mendorong integrasi, interkoneksi, interoperabilitas, serta keamanan dan keandalan infrastruktur sistem pembayaran; dan/atau meningkatkan praktik bisnis yang sehat, efisien, dan wajar dalam penyelenggaraan Sistem Pembayaran.

Manfaat bagi Nasabah

Pertama, nasabah akan dimudahkan dalam bertransaksi. Selama ini, nasabah melakukan pembayaran dengan satu

jenis bank atau *fintech*. Namun dengan adanya SNAP, transaksi di *e-commerce* akan dimungkinkan menggunakan layanan banyak bank dan/atau penyedia layanan pembayaran lainnya

Kedua, nasabah akan dimudahkan dengan adanya standardisasi (“bahasa nasional” yang terstandar) karena dengan adanya satu “bahasa” tersebut akan mendorong lebih banyak *interlink* atau komunikasi antara bank dengan *fintech* atau *e-commerce*. Adanya satu “bahasa” ini, juga akan memungkinkan lebih banyak bank bergabung dalam ekosistem *open API* pembayaran sehingga dapat menguntungkan nasabah/masyarakat.

Ketiga, *customer protection* distandardisasi dan perlindungan terhadap nasabah diutamakan. Artinya, SNAP dapat melindungi data nasabah

saat menggunakan transaksi atau pembayaran secara digital. Jadi, jika terjadi kebocoran, pihak *fintech* atau bank dapat membantu nasabah karena apa yang harus dilakukan sudah diatur dalam pedoman tata kelola.

Oleh karena itu, dengan adanya SNAP, BI dapat memastikan perlindungan data menjadi prioritas.

SNAP jelas memberikan manfaat bagi nasabah, dari sisi kemudahan transaksi maupun perlindungan data. Namun, masih harus perlu dipikirkan antisipasi terkait sisi infrastruktur, gangguan risiko siber, *shadow banking*, dan dukungan kebijakan. Mengingat, negara Indonesia secara geografis terbentang luas, terdiri dari banyak pulau, sehingga diperlukan strategi yang dapat menjangkau luasnya Indonesia. Diperlukan ketersediaan infrastruktur yang sangat andal, sehingga SNAP akan dapat mendorong inovasi layanan di sistem pembayaran dan memberikan manfaat bagi masyarakat luas.

Implementasi *open banking* merupakan suatu kebutuhan, untuk mendukung inovasi dan kompetisi, serta memperluas akses keuangan masyarakat.

Mewujudkan Sistem Pembayaran Andal

DI ERA DIGITAL

BICARA || EDISI 90 TAHUN 2021

EKONOMI DAN KEUANGAN DIGITAL MEMBERI PELUANG SEKALIGUS MEMBAWA RISIKO. BANK INDONESIA BERUPAYA MENYEIMBANGKAN KEDUA HAL TERSEBUT (*STRIKING THE RIGHT BALANCE*).

Digitalisasi ekonomi dan keuangan telah menjadi arus utama di hampir seluruh negara di dunia. Digitalisasi memberikan banyak peluang. Pihak industri dapat lebih banyak berinovasi, menghasilkan ragam produk/jasa serta menjangkau pasar yang lebih luas. Konsumen pun menjadi lebih mudah melakukan berbagai transaksi kapan saja dan di mana saja.

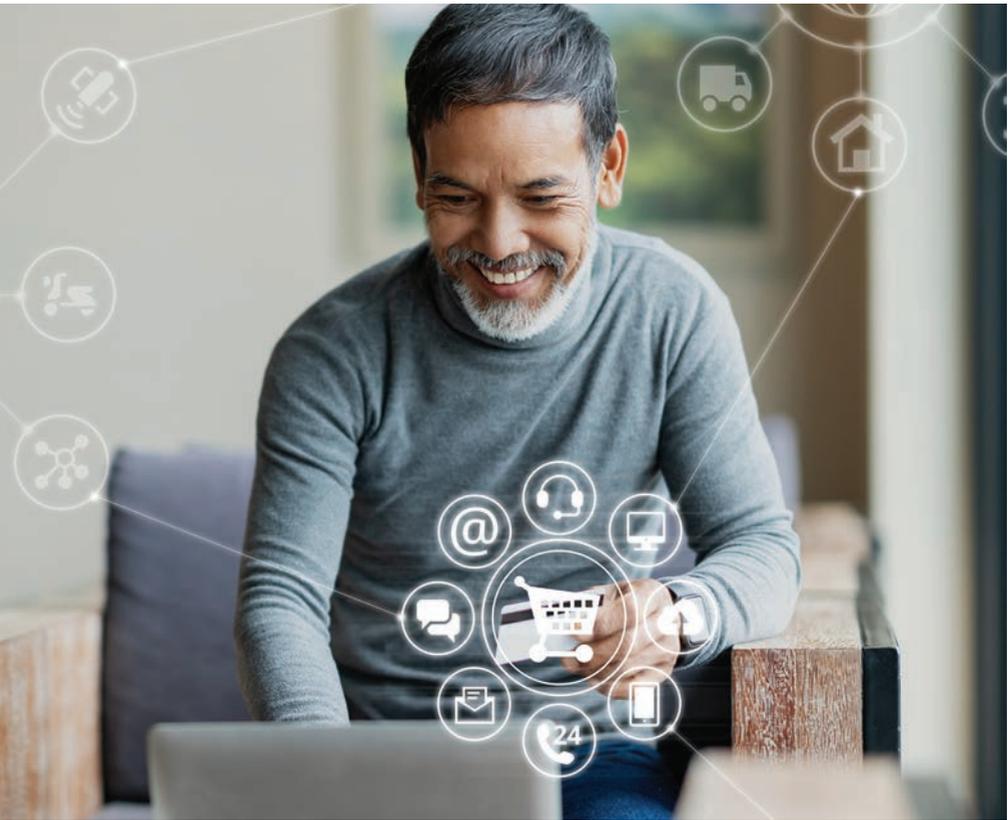
Namun, ekonomi dan keuangan digital (EKD) juga membawa risiko. Misalnya, praktik *shadow banking* dan penyalahgunaan data pribadi konsumen. Karenanya, pengembangan digitalisasi ekonomi dan keuangan perlu dilakukan secara cermat. Untuk itu, diperlukan kerangka pengembangan sistem pembayaran

(SP) yang komprehensif, yang mampu mengoptimalkan peluang sekaligus memitigasi risiko. Dalam hal ini, Bank Indonesia (BI) telah meluncurkan Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2025.

“BSPI 2025 merupakan arah kebijakan sistem pembayaran BI untuk menavigasi peran industri sistem pembayaran di era EKD,” ujar Kepala Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran BI, Filianingsih Hendarta.

BSPI 2025 berlandaskan pada 5 Visi Sistem Pembayaran Indonesia 2025 yaitu: (1) mendukung integrasi ekonomi dan keuangan digital, (2) mendukung digitalisasi perbankan, (3) menjamin *interlink fintech* dengan perbankan, (4) menjamin keseimbangan antara inovasi





dengan perlindungan konsumen, integritas dan stabilitas, serta persaingan usaha yang sehat; (5) menjamin kepentingan nasional dalam ekonomi dan keuangan digital antar negara.

Untuk mewujudkan Visi Sistem Pembayaran Indonesia 2025, dibentuk 5 *working group* yaitu: (1) *Open Banking*, (2) Sistem Pembayaran Ritel, (3) Sistem Pembayaran Nilai Besar dan Infrastruktur Pasar Keuangan, (4) Data dan Digitalisasi, serta (5) Integrasi Pengaturan, Perizinan, dan Pengawasan. Salah satu inisiatif dari Working Group 5 adalah menuangkan arah kebijakan, pengaturan, perizinan dan pengawasan sistem pembayaran, dengan mempertimbangkan upaya dalam mendorong inovasi sekaligus menjaga

stabilitas dan kepentingan nasional, serta menciptakan praktik bisnis yang sehat.

“BSPI 2025 akan diwujudkan melalui 23 *key deliverables* yang akan diimplementasikan secara bertahap dalam kurun 2019 sampai dengan 2025,” kata wanita yang akrab disapa Fili ini.

Guna mengakselerasi implementasi BSPI 2025, sambungnya, BI menetapkan kebijakan-kebijakan terkait sistem pembayaran (SP). Kebijakan itu diarahkan untuk akselerasi implementasi BSPI 2025 dalam rangka integrasi EKD nasional secara *end-to-end* melalui digitalisasi SP.

Kebijakan BI terkait SP yang diarahkan untuk akselerasi implementasi BSPI 2025 dalam rangka integrasi EKD nasional secara *end-to-end*, memiliki fokus pada

tiga kebijakan utama (*trilemma*). Pertama, mewujudkan industri SP yang sehat, kompetitif, dan inovatif. Kedua, integrasi, interkoneksi, interoperabilitas, serta keamanan dan keandalan infrastruktur SP. Ketiga, membangun praktik pasar (*market practice*) yang sehat, efisien, dan wajar dalam penyelenggaraan SP.

Untuk mengimplementasikannya, BI melakukan reformasi pengaturan SP dengan menerbitkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 22/23/PBI/2020 mengenai Sistem Pembayaran (SP). PBI yang terbit pada Desember 2020 dan berlaku pada 1 Juli 2021 ini, menjadi ‘payung besar’ yang menaungi penyelenggaraan SP di tengah era EKD.

“Selanjutnya, sebagai turunan dari PBI SP, BI juga menerbitkan PBI tentang Penyedia Jasa Pembayaran (PJP), PBI tentang Penyelenggara Infrastruktur Sistem Pembayaran (PIP), serta yang terbaru ialah PBI tentang Standar Nasional SP yang terbit

13 Agustus lalu. Kedudukan PBI PJP, PIP, dan Standar Nasional SP sejajar dan saling melengkapi,” papar Fili.

MENGAPA PERLU REFORMASI PENGATURAN SP?

Menjawab pertanyaan tersebut, Fili menjelaskan, BI sebelumnya sudah melakukan studi banding dan mempelajari sejumlah literatur. Antara lain, *IMF Working Paper tentang Oversight Issues in Mobile Payments* yang menyatakan bahwa landasan hukum kuat merupakan prasyarat untuk memastikan efektivitas pengawasan penyelenggaraan SP. Dalam meningkatkan efektivitas pengawasan itu, IMF merekomendasikan agar bank sentral memperhatikan beberapa prinsip umum, salah satunya perumusan dan diseminasi kebijakan, termasuk di dalamnya adalah penetapan standar dalam penyelenggaraan SP.

“Sepuluh tahun lalu bank sentral tidak

KEBIJAKAN SISTEM PEMBAYARAN

Kebijakan sistem pembayaran diarahkan untuk akselerasi implementasi Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia 2025 dalam rangka integrasi ekonomi dan keuangan digital nasional secara *end-to-end* melalui digitalisasi sistem pembayaran dengan fokus pengembangan ekosistem industri, infrastruktur, dan praktik pasar dalam penyelenggaraan sistem pembayaran



banyak terlibat di transaksi retail. Tapi tren global saat ini, semua bank sentral terlibat dalam transaksi retail. Karena itulah BI melakukan *regulatory reform*. BI mau membangun landasan hukum yang kuat sebelum mulai melakukan hal-hal lain. Regulasi ini diperlukan untuk mencari titik keseimbangan. Di satu sisi mendorong inovasi, di sisi lain menjaga stabilitas dan memitigasi risiko,” terang Fili.

STANDAR NASIONAL SISTEM PEMBAYARAN

Sebelumnya, BI sudah melakukan studi banding dan mempelajari sejumlah literatur, di antaranya *IMF Working Paper* tentang *Oversight Issues in Mobile Payments* yang menyatakan bahwa landasan hukum kuat merupakan prasyarat untuk memastikan efektivitas pengawasan penyelenggaraan SP. Dalam meningkatkan efektivitas pengawasan tersebut, IMF merekomendasikan agar bank sentral memperhatikan beberapa prinsip umum, salah satunya perumusan dan diseminasi kebijakan, termasuk di dalamnya adalah penetapan standar dalam penyelenggaraan SP.

Penerbitan PBI Standar Nasional Sistem Pembayaran pada 13 Agustus 2021 merupakan bagian dari reformasi regulasi BI di bidang SP. Sebelumnya, BI sudah memiliki sejumlah PBI terkait standar SP. Turunan dari PBI itu antara lain berupa Standar Nasional Teknologi Chip dan QR Code Indonesian Standard (QRIS). Standar-standar yang sudah ditetapkan itu tetap berlaku. Nantinya, melalui penerbitan PBI Standar Nasional SP, standardisasi SP akan lebih optimal.

PBI Standar Nasional SP bertujuan membangun industri SP yang sehat,

kompetitif, inovatif; infrastruktur SP yang terintegrasi, interkoneksi, interoperabilitas, aman, dan andal; serta praktik pasar yang sehat, efisien, dan wajar antara lain melalui *pricing policy* dan perlindungan konsumen. Ruang lingkupnya mencakup tata kelola, manajemen risiko, standar keamanan, interkoneksi, dan interoperabilitas SP. Isinya meliputi spek teknis, spek operasional, dan *code of practice*.

PBI ini juga mengatur kewenangan BI dalam menyusun, menetapkan, dan mengelola standar nasional SP. Kewenangan ini bisa dilakukan sendiri oleh BI atau dengan menugaskan *self regulated organization (SRO)*/pihak lain.

SRO yang ditugaskan wajib memenuhi beberapa syarat. Antara lain, melaksanakan tugas, memastikan keamanan dan keandalan SP, meminta persetujuan BI atas hal-hal

strategis, melakukan edukasi, dan menjaga kerahasiaan data. Jika SRO tidak melakukan kewajiban tersebut, BI akan menjatuhkan sanksi berupa teguran atau pengurangan kewenangan.

“Jadi BI dapat menugaskan SRO untuk menyusun standar nasional dan mengelolanya. Tapi, standar yang dihasilkan melalui

penugasan SRO, kepemilikannya tetap ada di BI. Hal ini untuk melindungi kepentingan publik,” imbuh Fili.

Ia menambahkan, BI dalam menyusun regulasi selalu berkoordinasi dengan pihak industri untuk memastikan regulasi itu bisa dijalankan dan benar-benar mampu mengakselerasi implementasi BSPI 2025. Selain itu, yang terpenting bisa membawa manfaat bagi masyarakat luas melalui kemudahan dalam melakukan transaksi digital secara cepat, mudah, murah, aman, dan andal (cemumauh).

Dalam menyusun regulasi, BI selalu berkoordinasi dengan pihak industri untuk memastikan regulasi itu bisa dijalankan.

PENARIKAN UANG RUPIAH KHUSUS 1970-1990

Pada 30 Agustus 2021 lalu, Bank Indonesia (BI) menarik dari peredaran 20 jenis pecahan Uang Rupiah Khusus (URK) Tahun Emisi (TE) 1970 sampai 1990. Penarikan dilakukan berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No.23/12/PBI/2021. Sejak tanggal tersebut, URK itu tidak lagi dapat digunakan sebagai alat pembayaran sah di Indonesia.

URK memang tidak biasa dijumpai dalam transaksi sehari-hari karena cenderung diperoleh dan digunakan sebagai cendera mata/koleksi. Masyarakat yang memiliki 20 jenis URK itu dan ingin menukarkannya, bisa mendatangi bank umum dan Kantor Pusat/ Kantor Perwakilan BI di seluruh Indonesia sebelum 29 Agustus 2031 dengan menjalankan protokol kesehatan.

DAFTAR 20 JENIS URK YANG DITARIK DARI PEREDARAN

KELOMPOK URK SERI 25 TAHUN KEMEDAKEAN RI TE 1970



KELOMPOK URK SERI CAGAR ALAM TE 1974



KELOMPOK URK SERI CAGAR ALAM TE 1987



KETENTUAN PENUKARAN

1

Dalam hal fisik uang Rupiah logam lebih besar 1/2 ukuran aslinya dan ciri uang Rupiah dapat dikenali keasliannya, diberikan penggantian sebesar nilai nominal Rupiah yang ditukarkan.

**Tukarkan
sebelum
29 Agustus
2021**

2

Dalam hal fisik uang Rupiah logam sama dengan atau kurang dari 1/2 ukuran aslinya tidak diberikan penggantian.

**KELOMPOK URK SERI SAVE
THE CHILDREN TE 1990**

PERAK



Rp10.000

EMAS



Rp200.000

**KELOMPOK URK SERI
PERJUANGAN ANGGKATAN
'45 RI TE 1990**

EMAS



Rp125.000

Rp250.000



Rp750.000





**PENYELESAIAN
TRANSAKSI DENGAN
MATA UANG LOKAL
(LCS) MENGURANGI
KETERGANTUNGAN
PADA MATA UANG
TERTENTU. STABILITAS
RUPIAH PUN MAKIN
TERJAGA.**

LCS

MENJAGA RUPIAH, MEMACU EKSPOR

Pada triwulan II 2021, ekonomi Indonesia tumbuh 7,07% (yoy), melesat jauh dari triwulan II 2020 yang minus 5,32% (yoy). Perbaikan ekonomi tersebut ditopang oleh kinerja positif seluruh komponen permintaan dan lapangan usaha, juga peningkatan ekspor.

Data Badan Pusat Statistik menunjukkan, pada triwulan II 2021, ekspor tumbuh mencapai 31,78% (yoy). Selain dipengaruhi oleh kenaikan permintaan negara mitra dagang utama, peningkatan ekspor juga tercapai berkat sinergi yang kuat pemerintah dengan otoritas terkait, termasuk Bank Indonesia (BI).

Upaya BI dalam mendorong ekspor dilakukan melalui sejumlah program. Salah satunya melalui penyelesaian transaksi bilateral dengan mata uang lokal (Local Currency Settlement/LCS). Dengan LCS, *settlement* transaksi perdagangan Indonesia dengan negara mitra dapat dilakukan dengan Rupiah atau mata uang negara mitra tanpa harus menggunakan Dolar Amerika Serikat (AS). Skema ini melibatkan bank ACCD (Appointed Cross Currency Dealer). Yaitu, bank yang ditunjuk oleh otoritas kedua negara untuk memfasilitasi pelaksanaan LCS di negara masing-masing.

“Dengan LCS, importir Indonesia dapat membayar tagihannya menggunakan

mata uang negara mitra, sebaliknya eksportir Indonesia juga dapat menerima pembayaran dalam Rupiah. Bagi pelaku usaha, skema ini akan mengurangi biaya transaksi perdagangan, karena terjadi *direct quotation* antara kedua mata uang lokal,” papar Kepala Departemen Internasional BI, Doddy Zulverdi, dalam Taklimat Media di Jakarta, Jumat (6/8).

Penggunaan Dolar AS, lanjut Doddy, memang masih dominan dalam transaksi perdagangan maupun investasi. Lebih dari 90% perdagangan Indonesia dengan negara-negara mitra di kawasan Asia maupun di luar Asia menggunakan Dolar AS. Ketergantungan yang tinggi terhadap Dolar AS itu menyebabkan ketidakseimbangan dalam pasar keuangan domestik.

“Rupiah selalu dibayangi oleh pergerakan Dolar AS sehingga menjadi sensitif dan fluktuatif. Volatilitas nilai tukar Rupiah yang tinggi berdampak negatif pada stabilitas harga serta kemampuan pelaku usaha dalam bertransaksi ke dan dari luar negeri. Itulah mengapa BI bersama pemerintah mendorong kerja sama LCS,” kata Doddy.

BERKEMBANG POSITIF

LCS telah diterapkan sejak 2018. Saat ini kerja sama LCS dilakukan bersama Thailand, Malaysia, Jepang, dan yang teranyar dengan Tiongkok. Dari waktu ke

waktu, perkembangannya sangat positif. Dengan Malaysia, transaksi LCS meningkat hingga tiga kali lipat ketimbang posisi awal pada 2018 atau 4,1% dari total perdagangan pada tahun 2020. Dari sisi nilai, penyelesaian transaksi LCS Indonesia-Malaysia tiap bulan mencapai ekuivalen 47 juta Dolar AS pada tahun 2021 atau sekitar 2,8% dari total perdagangan ekspor impor.

Transaksi LCS dengan Jepang juga berkembang baik. Dari yang awalnya 0,1% pada September-Desember 2020, menjadi 3,9% pada Januari-Agustus 2021. Nilainya mencapai ekuivalen 101 juta Dolar AS per bulan.

Di tengah pandemi, perkembangan ini dinilai cukup cepat dan diyakini akan lebih terakselerasi setelah BI dan negara mitra melakukan penguatan-penguatan. Dengan Malaysia misalnya, pada Senin (2/8) BI dan Bank Negara Malaysia menyepakati penguatan kerja sama LCS, dari yang semula hanya mencakup transaksi perdagangan diperluas mencakup investasi langsung dan *income transfer* (termasuk remitansi). Juga pelonggaran aturan transaksi valas, antara lain terkait perluasan instrumen lindung nilai dan peningkatan *threshold* nilai transaksi tanpa dokumen *underlying* sampai 200.000 Dolar AS per transaksi.

Adapun dengan Jepang, penguatan kerja sama LCS disepakati pada Kamis (5/8), antara BI dan Kementerian Keuangan Jepang (JMOF). Mencakup pelonggaran aturan transaksi valas dalam kerangka LCS, antara lain perluasan instrumen lindung nilai, pelaksanaan *hedging* atas dasar proyeksi perdagangan dan investasi, peningkatan fleksibilitas transfer atas rekening Rupiah di Jepang, dan peningkatan *threshold* nilai transaksi tanpa dokumen *underlying* sampai dengan 500.000 Dolar AS per transaksi.

Dengan potensi keuntungan bagi kedua negara, kerja sama LCS akan diperluas dan menggandeng lebih banyak negara mitra. Saat ini, BI tengah menjajaki kerja sama LCS dengan India, Korea Selatan, Filipina, dan Arab Saudi.

MEMPERDALAM PASAR KEUANGAN

Setiap transaksi memiliki risiko. Transaksi dengan skema LCS juga memiliki risiko yang mesti dikendalikan, yakni risiko nilai tukar. Namun risiko ini terbilang lebih rendah jika dibandingkan dengan transaksi menggunakan Dolar AS. Dan lagi, risiko tersebut dapat dimitigasi dengan instrumen *hedging*. “Pada transaksi LCS, risiko akan lebih rendah karena volatilitas mata uang kita terhadap mata uang negara-negara mitra lebih rendah dibanding terhadap Dolar AS,” ujar Kepala Departemen Pengembangan Pasar Keuangan BI, Donny Hutabarat.

Pada akhirnya, LCS tidak hanya mendorong ekspor dan menstabilkan Rupiah, tetapi juga bermanfaat untuk pendalaman pasar keuangan. Sebab, LCS akan mendorong para pelaku usaha untuk melakukan transaksi *spot*, *forward*, *swap* atau yang lainnya, dalam Rupiah terhadap mata uang negara mitra, untuk keperluan *hedging* dengan *eligible underlying* berupa perdagangan barang/jasa. Selain itu, pelaku usaha juga dapat menginvestasikan dana hasil perdagangan dan FDI mereka di pasar keuangan. Karenanya, BI menyertakan LCS sebagai bagian dari strategi pendalaman pasar keuangan.

Ia menambahkan, sebagai instrumen program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), pelaksanaan LCS melibatkan sinergi berbagai pihak, termasuk dengan pelaku usaha, kementerian, dan instansi pemerintah lainnya. Hal ini mendorong terbentuknya ekosistem yang berkelanjutan untuk LCS.

Ekosistem tersebut dapat berjalan dengan baik bila para pelaku usaha mampu beradaptasi dan memiliki kesadaran serta minat tinggi terhadap LCS. “Menjadi sebuah tantangan untuk membuat LCS menarik di mata para pelaku usaha. Saat ini, sejumlah kementerian tengah menyiapkan inisiatif-inisiatif untuk mendukung LCS. Kita optimistis, dengan LCS penggunaan Dolar AS dalam transaksi bisa dikurangi secara bertahap, dari 5% ke 10% lalu ke 20% (dan seterusnya),” pungkas Donny.

LOCAL CURRENCY SETTLEMENT

Penyelesaian Transaksi dengan Mata Uang Lokal (Local Current Settlement/ LCS) merupakan kerangka kerja sama penyelesaian transaksi bilateral dengan negara mitra tertentu menggunakan mata uang lokal. Penyelesaian transaksinya

dilakukan di dalam yurisdiksi wilayah negara masing-masing. Transaksi LCS dilakukan melalui bank Appointed Cross Currency Dealer (ACCD), yaitu bank yang ditunjuk oleh otoritas kedua negara untuk memfasilitasi pelaksanaan LCS.

MANFAAT

- Diversifikasi mata uang yang digunakan dalam transaksi bilateral antar negara
- Mengurangi biaya transaksi bilateral antar negara karena terjadinya *direct quotation* antara mata uang lokal, tanpa perlu konversi ke Dolar AS dulu
- Memunculkan alternatif investasi selain Dolar AS
- Mendorong pengembangan pasar keuangan domestik berbasis mata uang lokal
- Menjaga kestabilan nilai tukar Rupiah

NEGARA MITRA



Thailand



Malaysia



Jepang



Tiongkok

CAKUPAN TRANSAKSI

- Perdagangan
- Investasi langsung
- *Income transfer* (termasuk remitansi)

KRITERIA BANK ACCD

- Memiliki tingkat ketahanan dan kesehatan yang cukup
- Memiliki kapasitas dalam memfasilitasi perdagangan dan investasi dengan negara mitra dan kapasitas dalam menyediakan berbagai jasa keuangan
- Memiliki hubungan kerja sama yang baik dengan bank-bank di negara mitra.

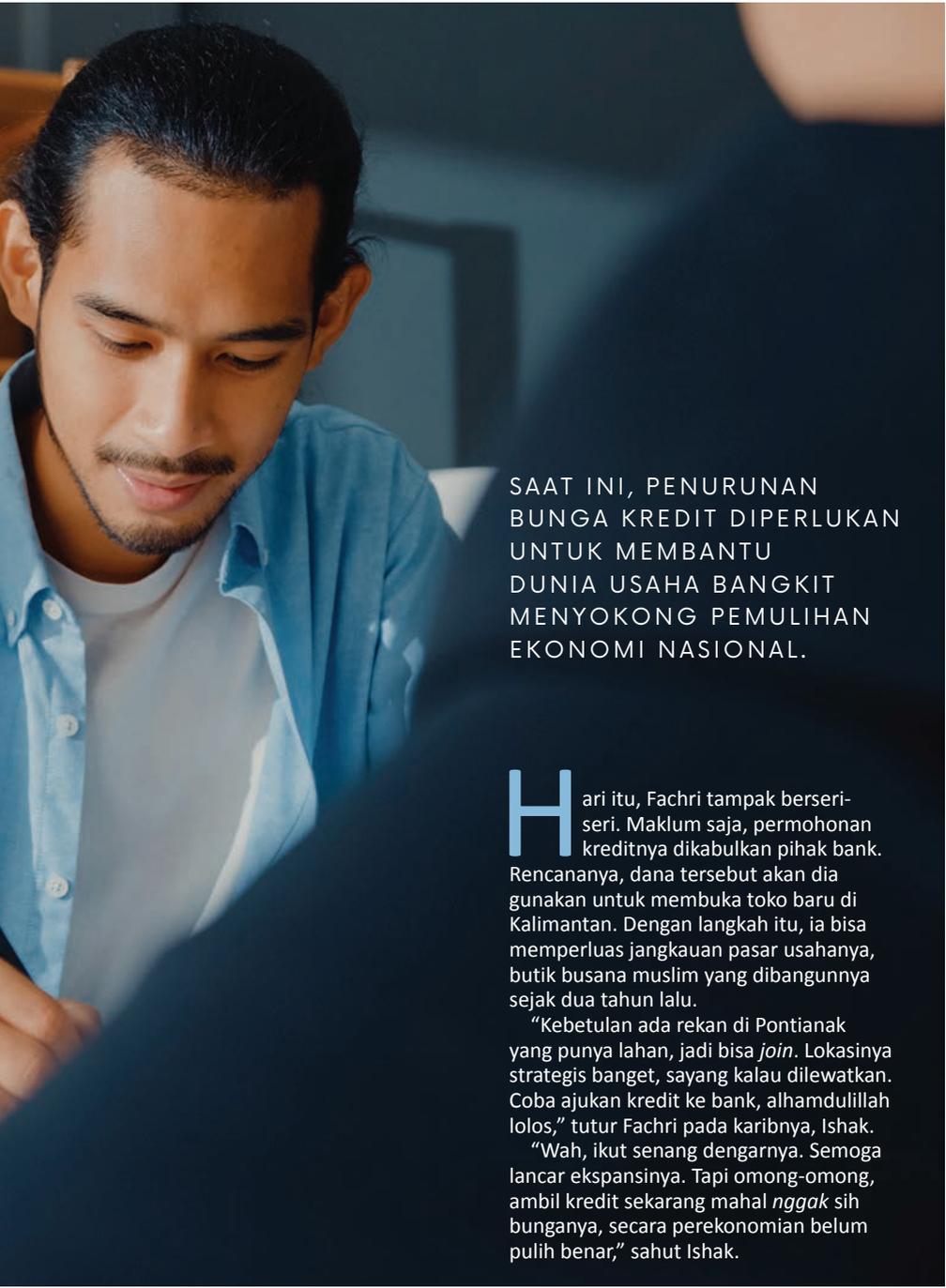


TRANSPARANSI SBDK*

Agar Bunga Kredit Semakin Turun

*SBDK: SUKU BUNGA DASAR KREDIT

FOTO SHUTTERSTOCK



SAAT INI, PENURUNAN BUNGA KREDIT DIPERLUKAN UNTUK MEMBANTU DUNIA USAHA BANGKIT MENYOKONG PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL.

Hari itu, Fachri tampak berseri-seri. Maklum saja, permohonan kreditnya dikabulkan pihak bank. Rencananya, dana tersebut akan dia gunakan untuk membuka toko baru di Kalimantan. Dengan langkah itu, ia bisa memperluas jangkauan pasar usahanya, butik busana muslim yang dibangunnya sejak dua tahun lalu.

“Kebetulan ada rekan di Pontianak yang punya lahan, jadi bisa *join*. Lokasinya strategis banget, sayang kalau dilewatkan. Coba ajukan kredit ke bank, alhamdulillah lolos,” tutur Fachri pada karibnya, Ishak.

“Wah, ikut senang dengarnya. Semoga lancar ekspansinya. Tapi omong-omong, ambil kredit sekarang mahal *nggak* sih bunganya, secara perekonomian belum pulih benar,” sahut Ishak.



“Justru sekaranglah waktu yang pas buat mengajukan kredit. Pemerintah lagi gencar-gencarnya menurunkan suku bunga, biar masyarakat, UMKM, dan perusahaan-perusahaan punya modal buat usaha. Kalau sektor usaha hidup, perekonomian makin bangkit,” papar Fachri. Ishak yang sedari tadi serius menyimak pun mengangguk-anggukan kepalanya.

Apa yang dijelaskan Fachri benar adanya. Pemerintah, BI, dan pihak terkait lainnya mengerahkan berbagai jurus untuk memulihkan perekonomian di tengah pandemi yang melanda. Salah satunya ialah mendorong kredit. Strategi itu ditempuh melalui beberapa cara, antara lain mendorong penurunan suku bunga kredit melalui transparansi Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK).

SBDK adalah suku bunga yang digunakan oleh setiap bank sebagai dasar penetapan suku bunga kredit yang akan dikenakan kepada nasabah. Dalam menentukan SBDK, perbankan memperhitungkan tiga komponen biaya yaitu harga pokok dana, biaya *overhead*, dan *margin keuntungan*. Setiap bulan, BI mempublikasikan hasil asesmen mengenai perkembangan SBDK perbankan Indonesia melalui *website* www.bi.go.id sebagai lampiran dari Siaran Pers Keputusan RDG

Bulan. Langkah ini sebagai bagian dari kebijakan transparansi SBDK tersebut.

Hasil asesmen itu bisa diakses oleh masyarakat maupun pelaku usaha sehingga mereka dapat membandingkan besaran SBDK antarbank. Akan tetapi perlu ditekankan bahwa besaran SBDK tidak selalu sama dengan suku bunga kredit yang dikenakan oleh bank kepada debitur. Hal ini disebabkan SBDK belum memperhitungkan komponen estimasi premi risiko yang besarnya tergantung dari penilaian bank terhadap risiko tiap debitur atau kelompok debitur. Jadi, besar suku bunga kredit yang dikenakan kepada debitur bisa jadi lebih tinggi dibandingkan dengan SBDK. Meski demikian, data SBDK yang dipublikasikan BI sangat membantu masyarakat dan dunia usaha untuk mendapatkan acuan awal dalam menentukan bank mana yang memiliki SBDK rendah dan sesuai dengan preferensinya.

MEMPERCEPAT TRANSMISI KEBIJAKAN MONETER

Kebijakan transparansi SBDK dilakukan sejak Februari 2021. Transparansi melalui publikasi ini dilakukan untuk memperkuat dan mempercepat transmisi kebijakan moneter dan makroprudensial BI. Utamanya, agar kebijakan penurunan suku

bunga acuan yang sudah dilakukan BI juga diikuti dengan penurunan suku bunga kredit oleh perbankan.

Sebelumnya, sepanjang 2020 BI telah memangkas suku bunga acuan sebanyak 125 basis poin (bps) hingga ke level 3,75%. BI juga terus melakukan pelonggaran likuiditas. Kedua langkah itu diharapkan segera direspons perbankan dengan menurunkan suku bunga kredit. Namun, penurunan suku bunga kredit perbankan selama tahun 2020 masih belum optimal, yaitu masih terbatas sebesar 83 bps ke level 9,70%.

Lambatnya penurunan suku bunga kredit disebabkan oleh masih tingginya SBDK perbankan. Oleh karena itu, BI melihat masih terdapat ruang untuk dapat lebih menurunkan suku bunga kredit tersebut agar dapat sejalan dengan suku bunga acuan. Terhitung sejak Februari 2021, BI pun menyusun Asesmen Transmisi Suku Bunga Kebijakan kepada Suku Bunga Dasar Kredit Perbankan dan memublikasikannya dalam situs www.bi.go.id disertai daftar SBDK seluruh bank di Indonesia.

Melalui transparansi SBDK, diharapkan, perbankan merespons untuk menyesuaikan SBDK mereka dengan penurunan suku bunga acuan.

Selanjutnya, transmisi suku bunga kebijakan yang lebih baik ke suku bunga kredit, dalam bentuk penurunan suku bunga kredit yang sepadan, diharapkan akan mampu meningkatkan permintaan kredit sehingga membantu pemulihan ekonomi.

Dengan publikasi hasil asesmen ini, di samping mendorong transmisi kebijakan moneter agar lebih efektif, BI juga berupaya untuk memperluas diseminasi informasi kepada konsumen kredit baik korporasi maupun rumah tangga. Publikasi ini juga bertujuan meningkatkan tata kelola, disiplin pasar, dan kompetensi dalam pembentukan

SBDK perbankan sehingga SBDK yang ditawarkan dapat lebih kompetitif dalam mendorong permintaan kredit dan mempercepat pemulihan ekonomi.

Publikasi semacam itu sudah menjadi praktik internasional yang sering dijumpai. Bank sentral negara lain seperti di Malaysia, India, dan Tiongkok juga meluncurkan kebijakan transparansi suku bunga kredit melalui publikasi *External Benchmark Rate*, *Loan Prime Rate*, dan *Base Rate*. IMF juga meminta tiap negara anggota untuk menyampaikan *Reference Lending Rate* dan *Reference Deposit Rate* untuk dipublikasikan sebagai selisih referensi suku bunga pinjaman terhadap suku bunga simpanan, yang merupakan salah satu Financial Soundness Indicator (FSI).

MEMBUAHKAN HASIL POSITIF

Kebijakan transparansi SBDK membuahkan hasil positif. Selisih antara SBDK terhadap BI7DRR menyempit

sebesar 97 bps (yoy) dari 6,24% pada Agustus 2020 menjadi 5,27% pada Agustus 2021. Mengencilnya selisih ini menunjukkan bahwa bank merespons penurunan suku bunga kebijakan dengan lebih baik, dan

mentransmisikannya ke dalam penurunan SBDK. Respons ini pun tampak pada suku bunga kredit baru yang turun 76 bps (yoy), dari yang sebelumnya 9,46% pada Agustus 2020 menjadi lebih rendah yaitu 8,70% pada Agustus 2021.

Ke depan, BI berharap perbankan terus melanjutkan penurunan suku bunga kredit sebagai bagian dari upaya bersama untuk mendorong penyaluran kredit kepada dunia usaha. Ketika dunia usaha kembali bangkit, pemulihan perekonomian nasional pun akan lebih cepat terwujud.

Melalui transparansi SBDK, masyarakat dan pelaku usaha akan dapat melihat dan membandingkan suku bunga dasar kredit yang ditawarkan oleh bank-bank.



Sobat Rupiah, saat ini, berinvestasi menjadi pilihan menarik karena mampu mendatangkan imbal hasil yang menguntungkan. Investasi pun dinilai lebih bisa menjamin masa tua, juga menjadi bekal saat situasi finansial kurang kondusif, seperti di masa pandemi ini. Namun, lebih dari itu, investasi tidak hanya bermanfaat bagi diri sendiri. Investasi, bila dilakukan di dalam negeri, juga berperan besar membantu pembangunan bangsa.

Pembangunan yang dilakukan pemerintah ditujukan untuk menyejahterakan seluruh masyarakat Indonesia. Termasuk, mewujudkan pemerataan infrastruktur

serta akses kesehatan dan pendidikan di penjuru Nusantara. Tentu saja, upaya tersebut perlu didukung kecukupan anggaran. Di sinilah masyarakat bisa berperan, membantu melalui investasi pada Surat Berharga Negara (SBN).

SBN, atau dikenal juga dengan Surat Utang Negara (SUN), adalah surat berharga yang diterbitkan oleh pemerintah dalam rangka mencari pembiayaan anggaran. SBN tidak hanya ditawarkan untuk investor besar dan institusi, tetapi juga untuk perseorangan. SBN untuk perseorangan disebut SBN ritel.

Sejauh ini, di Indonesia jumlah investor



Yuk, Berinvestasi SEKALIGUS BANTU NEGERI

INVESTASI PADA SBN RITEL
SANGAT MENGUNTUNGKAN
DAN AMAN DENGAN
JAMINAN NEGARA. LEBIH
DARI ITU, KITA TURUT SERTA
BERPARTISIPASI DALAM
PEMBANGUNAN BANGSA.

BICARA || EDISI 90 TAHUN 2021

ritel menunjukkan tren positif. Hal ini bisa dilihat dari perkembangan jumlah Single Investor Identification (SID). Tercatat, pada 2019 jumlah investor naik 53,41% (yoy) atau dari 1,62 juta orang menjadi 2,48 juta orang. Pada 2020 jumlah itu naik 56,21% (yoy) atau menjadi 3,88 juta investor. Lalu pada Mei 2021 terjadi peningkatan 38,43% (yoy) atau mencapai 5,37 juta orang.

Namun, apakah jumlah itu tergolong besar? Bila dibandingkan dengan jumlah penduduk Indonesia usia produktif, yakni usia 15-64 tahun, yang mencapai 191 juta jiwa, baru 3% yang menjadi investor. Padahal basis investor yang kuat diperlukan

untuk mendukung stabilitas sistem keuangan nasional.

Sebagai warga negara yang cinta Tanah Air, Sobat Rupiah pasti berharap dapat berperan aktif memajukan Indonesia, bukan? Nah, berinvestasi melalui SBN bisa menjadi langkah tepat. Masih bertanya-tanya bagaimana memulainya? Ikuti cara-cara berikut ini ya, Sobat.

MANTAPKAN TUJUAN

Sebelum mulai berinvestasi, Sobat Rupiah wajib memantapkan tujuan berinvestasi. Secara pribadi, investasi pasti ditujukan untuk jaminan masa depan yang

pastinya menguntungkan. Namun jika diperluas lagi, investasi untuk membantu pembangunan Indonesia ke depan, tidak ada ruginya juga, lho. Mengapa? Karena pembangunan dan kemajuan yang terjadi di Indonesia pasti akan terasa manfaatnya bukan hanya bagi Sobat sendiri, melainkan juga bagi saudara-saudara sebangsa dan se-Tanah Air.

Partisipasi aktif sebagai investor ritel dalam instrumen SBN juga terjamin aman, sebab SBN menjadi alternatif investasi yang mengeliminasi risiko gagal bayar, artinya uang akan kembali dan Sobat pasti untung. Dalam hal ini, pemerintah menjamin pembayaran pokok dan bunganya dilakukan secara profesional.

PERDALAM LITERASI

Setelah tujuan sudah jelas, sekarang waktunya untuk memperdalam pengetahuan. Seperti yang sudah disebutkan di atas, SBN ritel adalah sarana terbaik untuk menjadi investor aktif pembangun negeri. SBN ritel sendiri terdiri dari beberapa jenis instrumen antara lain Obligasi Ritel Indonesia (ORI), Savings Bond Ritel (SBR), Sukuk Ritel, dan Sukuk Negara Tabungan. Perbedaan antara instrumen-instrumen itu terletak pada prinsip pengelolaan (konvensional/syariah), tenor, kupon (bunga), perdagangan di pasar sekunder, dan potensi *capital gain* (kenaikan harga).

Sejak 2018 lalu pemerintah telah meluncurkan inovasi untuk menarik minat dan mempermudah investor pemula yang ingin membeli SBN yakni pembelian SBN secara daring (e-SBN). Hal itu dilakukan untuk memperluas cakupan basis investor muda yang terbiasa dengan gawai, memberi kuota bagi investor perseorangan, dan mengurangi hambatan pemasaran di daerah-daerah pelosok.

Masih bingung menentukan pilihan? Tenang, Bank Indonesia (BI) bersama Kementerian Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menjalankan program

bernama Like It!, akronim dari Literasi Keuangan Indonesia Terdepan. Program yang digelar secara langsung dari kanal media sosial BI ini dikemas secara atraktif dan ditujukan untuk menjangkau seluruh lapisan masyarakat yang ingin memiliki pemahaman memadai tentang berbagai instrumen keuangan. Program itu juga memperkaya pengetahuan tentang cara-cara bijak berinvestasi dan cara cerdas mengelola keuangan.

Like It! telah terlaksana tiga kali sejak dimulai dua bulan lalu. Like It! pertama dilakukan pada 3 Agustus 2021 dengan tema Literasi Investasi Lintas Generasi. Like It! berikutnya diselenggarakan dengan tema Yuk berinvestasi di Pasar Modal, pada 5 Agustus 2021. Adapun Like It! ketiga digelar pada 13 Agustus 2021 dengan mengusung tema Mari Bersama Membangun Negeri dengan Menjadi Investor di Negeri Sendiri.

Dalam setiap pelaksanaannya, Like It! menampilkan para pakar dari BI, Kementerian Keuangan, OJK, maupun LPS serta para praktisi muda di bidang keuangan. Setiap sesinya juga menghadirkan bintang

tamu yang menambah keseruan acara. Bagi Sobat Rupiah yang ketinggalan siaran langsungnya, bisa menyimak siaran lengkapnya di kanal Youtube Bank Indonesia ya.

PERCAYA DIRI DAN KONSISTEN

Setelah membekali diri dengan ilmu, kini Sobat Rupiah tinggal lakukan satu hal, yakni percaya diri untuk mulai berinvestasi di SBN ritel. Dengan *return* yang stabil dan lebih tinggi ketimbang bunga deposito bank BUMN, apalagi dijamin pemerintah, sudah selayaknya e-SBN mendapat kepercayaan Sobat ya.

Jangan lupa cek jadwal pemesanan instrumen e-SBN dari berbagai bank BUMN maupun swasta, juga beberapa mitra distribusi resmi yang ditunjuk pemerintah. Pembelian instrumen SBN ritel selama masa penawaran cukup terjangkau, mulai dari minimal Rp1.000.000 per unit dengan



4 LANGKAH INVESTASI SBN RITEL



REGISTRASI

Daftar pada sistem elektronik mitra distribusi, mengisi data diri. Harus memiliki SID terlebih dulu.

PEMESANAN

Melakukan pemesanan SBN selama masa penawaran dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku.



KONFIRMASI

Setelah pembayaran memperoleh NTPN dan notifikasi completed order

PEMBAYARAN

Setelah verifikasi, mendapat kode billing yang digunakan untuk pembayaran atau penyetoran dana investasi



Perbandingan ORI, SBR, ST, dan SR

	ORI (OBLIGASI NEGARA RITEL)	SBR (SAVINGS BOND RITEL)	ST (SUKUK TABUNGAN)	SR (SUKUK RITEL)
Tingkat Imbal Hasil	Tetap	Mengambang dengan tingkat minimum	Mengambang dengan tingkat minimum	Tetap
Jatuh Tempo	3 Tahun	2 Tahun	2 Tahun	3 Tahun
Perdagangan di Pasar Sekunder	Bisa	Tidak Bisa	Tidak Bisa	Bisa
Pencairan Lebih Awal (Early Redemption)	Tidak bisa	Bisa	Bisa	Tidak bisa
Potensi Kenaikan Harga (Capital Gain)	Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Ada

Sumber: DJPPR Kemenkeu

tenor 2-3 tahun. Maksimal pembelian adalah 3.000 unit atau Rp3 miliar. Sebelum menjadi e-SBN, nilai minimum pembelian minimalnya Rp5.000.000. Harapannya, penurunan nilai minimum itu dapat membuat siapa pun jadi investor untuk negerinya sendiri.

Jadi, jika Sobat Rupiah ingin mendapat keuntungan yang rutin sambil berperan aktif untuk membangun bangsa, jadilah investor SBN ritel yang konsisten ya. Sebesar apapun investasi Sobat Rupiah, akan sangat bermanfaat bagi peningkatan pembangunan Indonesia.



Menimba Ilmu Agama

MENGASAH JIWA WIRAUSAHA



TAK HANYA FOKUS PADA PENDIDIKAN AGAMA, PARA SANTRI PONDOK PESANTREN KEBON JAMBU AL-ISLAMY JUGA MENDAPAT KESEMPATAN MENIMBA ILMU KEWIRAUSAHAAN.

Babakan merupakan sebuah pedukuhan kecil yang terletak di bagian barat daya Kabupaten Cirebon. Di sinilah seorang kiai berdarah Mataram, Syekh Hasanuddin bin Abdul Latif alias Ki Jatira mendirikan pondok pesantren pertama pada 1705. Pondok pesantren itu diberi nama Babakan Ciwaringin. Dari satu pesantren, desa yang tak jauh dari Kabupaten Majalengka itu kini memiliki tak kurang dari 50 pesantren. Salah satunya adalah Pondok Pesantren Kebon Jambu Al Islamy. Tak sulit menemukan pesantren yang dibangun di lahan seluas 1.400 meter persegi yang dulunya kebun jambu biji ini.

Selain papan nama, di kiri kanan jalan menuju gerbang pesantren, terdapat dua bangunan yang difungsikan sebagai tempat usaha. Usaha pangkas rambut menempati bangunan kecil di sebelah kiri. Satu bangunan besar bertingkat di sebelah

kanan digunakan sebagai koperasi dan toko kelontong di lantai dasar, serta kedai kopi kekinian bernama Jamboe Cafe plus kebun hidroponik di lantai atas.

Semua tempat usaha itu milik pesantren. Selain membantu operasional pesantren, pemimpin pesantren, Nyai Hj. Masriyah Amva, memberi kesempatan kepada para santri untuk terlibat langsung mengelola semua sektor usaha tersebut di bawah bimbingannya. “Kami merekrut anak-anak yang mau atau berminat, jadi kita bekal ilmu perniagaan, sosial maupun pertanian, sehingga setelah lulus dia memiliki keahlian,” kata Saili Rahmah, menantu Nyai Hj. Masriyah Amva, kepada BICARA pada September 2021 lalu.

Untuk santri putri, selain koperasi, pesantren juga mengembangkan sektor usaha laundry dan konveksi. Pada 2018, pesantren mendapat bantuan Program Sosial Bank Indonesia berupa empat mesin jahit dan satu mesin obras. Beberapa santri perempuan juga mendapat pelatihan menjahit untuk meningkatkan produktivitas usaha konveksinya.

“Alhamdulillah sampai sekarang masih berjalan,” kata Saili. Untuk saat ini, karena keterbatasan SDM, usaha konveksi ini hanya terbatas memenuhi kebutuhan para santri. Namun di masa mendatang, tak

menutup kemungkinan untuk menerima pesanan dari luar.

Bank Indonesia juga sempat memberikan pelatihan usaha laundry kepada sejumlah santri. Mereka jadi lebih paham bagaimana mengelola bisnis laundry, termasuk cara mengemas pakaian dan memperbaiki sistem pembayaran bisnis tersebut. Khusus untuk usaha laundry, karena ketersediaan air yang terbatas, selama ini pesantren bekerja sama dengan sebuah perusahaan laundry di Majalengka.

Terkait sektor usaha ini, para santri yang terlibat tak hanya mendapat ilmu. Mereka juga mendapat reward berupa upah setiap bulannya yang bisa digunakan untuk meringankan biaya pendidikan mereka. “Kami ingin memberdayakan anak-anak santri agar seetelah keluar dari pesantren ada bekal kemampuan berwirausaha,” kata Saili.

MENDIDIK MULAI MADRASAH HINGGA PERGURUAN DIDIK

Pondok Pesantren Kebon Jambu Al-Islamy dibangun oleh KH. Muhammad pada 20 November 1993. Setelah KH. Muhammad wafat pada 1 November 2006, pengelolaan pesantren diteruskan sang istri, Nyai Hj. Masriyah Amva, dibantu anak-anak dan menantunya.





Saat ini jumlah santrinya lebih dari 1.000 orang, mulai dari tingkat Sekolah Menengah Pertama, hingga perguruan tinggi. Santri-santri yang seluruhnya mondok di pesantren, bukan cuma datang dari Wilayah III Cirebon (Kabupaten Cirebon, Kota Cirebon, Indramayu, Majalengka, Kuningan). Banyak juga yang berasal dari daerah lain di Indonesia.

Menerapkan sistem salafi, Pondok Pesantren Kebon Jambu menekankan pada pembelajaran kitab-kitab klasik atau kitab kuning dengan metode pengajaran *bandongan* (ceramah) dan *sorogan* (privat). Kegiatan santri dimulai pukul 03.30 hingga 22.00, dengan beberapa kali waktu istirahat.

Di pondok pesantren Kebon Jambu, santri diklasifikasikan ke dalam dua jenis. Pertama, santri *'ām* (santri umum), yaitu mereka yang mondok sekaligus mengenyam sekolah formal. Jenjang pendidikan yang tersedia adalah MTAKJ (Madrasah Tahsinul Akhlaq Kebon Jambu), SMPTP (Sekolah Menengah Pertama Tunas Pertiwi), MATP (Madrasah Aliyah Tunas Pertiwi), MAKJ (Madrasah Aliyah Kebon Jambu) dan perguruan tinggi Ma'had Aly yang fokus pada hukum tentang keperempuanan.

Kedua, santri *takhosus* (santri khusus), yang memilih sekolah nonformal (sekolah pondok) yang sudah diadakan lama oleh pesantren. Adapun nama sekolah/lembaga pendidikannya disebut MTAS (Madrasah Tahsinul Akhlak as-Salafiyah).



PONDOK PESANTREN KEBON JAMBU AL-ISLAMY

Alamat: Jalan Kebon Jambu No.01 Babakan, Kecamatan Ciwaringin, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat
Pendiri: Al-Mukarrom KH. Muhammad
Pimpinan: Nyai Hj. Masriyah Amva
Jumlah Santri: 1.600 Santri Mukim

Para santri juga bisa memilih kegiatan ekstrakurikuler sesuai minatnya. Pilihannya beragam. Mulai dari kaligrafi, pencak silat, rebana, *thafidz* Al-Qur'an, *public speaking*, *drum band*, hingga keterampilan wirausaha. Jadi selain pendalaman agama, kreativitas santri termasuk di bidang seni, juga tetap diasah.

BELAJAR TATAP MUKA DI MASA PANDEMI

Di awal pandemi Covid-19, Pondok Pesantren Kebon Jambu sempat menghentikan kegiatan memulangkan seluruh santrinya. Kondisi "*lockdown*" ini berlangsung sekitar empat bulan. Namun setelah Lebaran 2021, aktivitas belajar mengajar kembali normal.

Untuk mencegah penularan, selain vaksinasi, setiap santri yang baru kembali dari kampung halamannya wajib melakukan tes antigen. Santri yang kedapatan sakit dan menunjukkan gejala-gejala yang mengarah ke Covid-19, segera dipisahkan dari santri-santri lain. Untungnya, hingga saat ini tak ada satu pun santri yang dinyatakan positif. Pembelajaran tatap muka pun berjalan lancar.



BI BANK SENTRAL BUAH PERJUANGAN BANGSA

Kantor De Javasche Bank setelah pembangunan selesai tahun 1937.



Tampak depan bangunan De Javasche Bank setelah penambahan gedung tahun 1933.

PENDIRIAN BANK INDONESIA BUKANLAH KADO DARI BELANDA. BANK INDONESIA LAHIR MELALUI PERJUANGAN DENGAN STRATEGI YANG DISUSUN SECARA CERMAT.

Tepat pada 1 Juli 2021, Bank Indonesia (BI) genap berusia 68 tahun. Ibarat manusia, BI telah memasuki usia yang sangat matang. BI memiliki sejarah panjang yang sarat dengan pembelajaran. Lika-liku perjalanannya semakin mengokohkan BI sebagai bagian dari wujud kedaulatan ekonomi Indonesia.

Awal mula pendirian BI tidak lepas dari keberadaan De Javasche Bank (DJB) yang dibangun oleh Raja Belanda, Raja Willem I, pada 1828. Pendiiriannya ditujukan untuk mengatasi permasalahan ekonomi dan keuangan di wilayah Hindia Belanda usai kebangkrutan Vereenigde Oost Indische Compagnie (VOC).

Pemerintah Kerajaan Belanda memberikan *octrooi* (hak-hak istimewa) kepada DJB untuk bertindak sebagai bank sirkulasi. Sebagai bank sirkulasi, DJB memiliki kewenangan untuk mencetak dan mengedarkan uang Gulden di wilayah Hindia Belanda. Dalam perkembangannya, DJB terus digunakan pemerintah kolonial untuk mendukung kebijakan keuangan dan ekonomi mereka. Kantor cabangnya pun terus ditambah.

DESAKAN UNTUK NASIONALISASI DJB

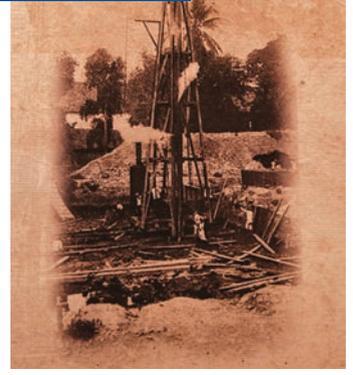
Pada 1945, meski sudah merdeka, Indonesia belum memiliki bank sentral. Baru belakangan pada 1946 didirikan Bank Negara Indonesia (BNI) yang tugas utamanya menjadi bank sentral. Meski demikian, BNI tidak pernah dapat menjalankan tugasnya secara penuh karena kondisi Indonesia yang sedang berperang. DJB sendiri, tutup kare-

na banyak pegawainya yang sakit, meninggal, atau melarikan diri saat pendudukan Jepang. DJB baru dibuka ketika Nederlands Indie Civil Administration (NICA) datang dan menguasai kota-kota besar. Secara bertahap, DJB lalu membuka kantor-kantor cabang di kota-kota yang dianggap penting secara ekonomi oleh mereka.

Hingga menginjak 1950, perekonomian Indonesia masih didominasi struktur buatan Belanda. Saat itu perbankan Indonesia tidak banyak berperan. Hingga, timbul keinginan di masyarakat untuk memasukkan lebih banyak unsur nasional dalam struktur ekonomi Indonesia.

Usai Konferensi Meja Bundar (23 Agustus-2 November 1949) yang juga menghasilkan kesepakatan bidang keuangan dan perekonomian, timbul desakan kuat dari masyarakat dan tokoh-tokoh elite Indonesia untuk melakukan nasionalisasi DJB. Tokoh yang pertama kali

Proses pembangunan gedung baru De Javasche Bank di Batavia.



Kompleks perkantoran De Javasche Bank dilihat dari arah Kali Besar. Pada tahun 1913, bagian samping dan belakang masih menggunakan bangunan lama eks rumah sakit. Pada bagian belakang terlihat menara dari bangunan yang baru selesai didirikan.

menyampaikan gagasan nasionalisasi DJB adalah Menteri Keuangan Kabinet Sukiman, Mr. Jusuf Wibisono.

Pemerintah kemudian membentuk panitia nasionalisasi DJB berdasarkan Surat Keputusan Presiden No. 118 tanggal 2 Juli 1951, yang berlaku surut sejak 19 Juni 1951. Panitia diketuai Mohamad Sediono yang dibantu oleh empat orang anggota, yaitu Mr. Soetikno Slamet (kelak menjadi salah satu Gubernur BI), Dr. R.M. Soemitro Djojohadikoesoemo, T.R.B Sabarudin, serta Drs. Khouw Bian Tie.

PEMERINTAH RI BELI SAHAM DJB

Pemerintah RI pada akhirnya memutuskan untuk tidak melakukan nasionalisasi DJB secara sepihak. Sebab tindakan tersebut akan berdampak buruk, antara lain memicu reaksi keras dari berbagai lembaga dunia yang merugikan kepentingan Indonesia.

Sejalan dengan pemikiran tersebut, akhirnya panitia memutuskan untuk melakukan pengambilalihan kepemilikan dengan cara membeli saham-sahamnya. Maka, pada 3 Agustus 1951 pemerintah RI mengajukan penawaran untuk membeli saham-saham DJB dari para pemiliknya.

Semula, Menteri Keuangan Belanda menolak niat pemerintah RI itu. Namun pihak RI berhasil meyakinkannya bahwa tindakan tersebut merupakan langkah terbaik dan realistis di tengah euforia kemerdekaan Indonesia. Diplomasi oleh dua delegasi Indonesia yaitu M. Saubari selaku Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan dan Khouw Bian Tie selaku anggota dari Panitia Nasionalisasi DJB berhasil meyakinkan Vereeniging voor de Effectenhandel (perkumpulan pedagang efek), Amsterdam, bahwa Indonesia akan membayar saham-saham DJB secara wajar, bahkan dengan harga pembelian 20% di atas harga normal.

Saham-saham kepemilikan DJB kemudian dibeli oleh Pemerintah RI dengan kurs 120% dalam valuta uang Belanda atau valuta lain sesuai tempat tinggal pemilik saham, dan

kurs 360% untuk pemilik saham berkewarganegaraan Indonesia (dalam Rupiah). Total harga nominal saham dan sertifikat yang dibeli pemerintah untuk menasionalisasi DJB sebesar 8,95 juta Gulden. Pemerintah akhirnya berhasil mengambil alih 99,4% saham DJB. Sisanya 0,6% dianggap hilang karena tidak jelas pemiliknya. Setelah semuanya beres, tanggal 15 Desember 1951 DJB resmi dinasionalisasi berdasarkan Undang-Undang No.24 Tahun 1951.

Proses nasionalisasi DJB yang panjang (1951-1953) mencapai puncaknya ketika Undang-Undang No. 11 Tahun 1953 tentang Penetapan Undang-Undang Pokok Bank Indonesia disahkan. UU itu mulai berlaku sejak 1 Juli 1953, karena itulah, kelak, 1 Juli kemudian diperingati sebagai hari lahir BI. Dengan berlakunya UU tersebut, BI resmi ditetapkan sebagai Bank Sentral RI. Kemudian, Sjafruddin Prawiranegara diangkat sebagai Gubernur BI yang pertama.

HASIL PERJUANGAN BANGSA BERDAULAT

Masyarakat Indonesia kala itu sangat antusias menyambut lahirnya BI. Beberapa surat kabar nasional yang merekam peristiwa itu menyebutkan, lahirnya BI menjadi pembuka zaman baru di bidang keuangan. Surat kabar *Merdeka* terbitan 9 Juli 1953, misalnya, menyebutkan, "...hendaknya tanggal 1 Juli 1953 kita pandang sebagai hari peresmian perubahan tujuan dan maksud pemerintah dan bank sentralnya, sesuai dengan cita-cita tiap-tiap negara yang betul-betul merdeka politik maupun ekonomis."

Adapun para tokoh di seputar nasionalisasi DJB seperti Jusuf Wibisono, Sjafruddin Prawiranegara, Soemitro Djojohadikusumo, dan Loekman Hakim, menyebut bahwa kehadiran BI adalah bagian dari kedaulatan bangsa. BI bukanlah warisan kolonial, atau dengan kata lain "*Bank Indonesia is geen een cadeautje*" alias bukan kado kecil dari Belanda. BI lahir dari perjuangan bangsa dan negara Indonesia yang berdaulat.





JELAJAH WISATA

Cirebon - Kuningan

ADA BANYAK DESTINASI WISATA DI CIREBON DAN KUNINGAN YANG KEREN DAN INSTAGENIC. DUA WILAYAH DI JAWA BARAT INI MEMANG PAS UNTUK BERLIBUR.



WOODLAND, AGROWISATA DI KAKI GUNUNG CIREMAI

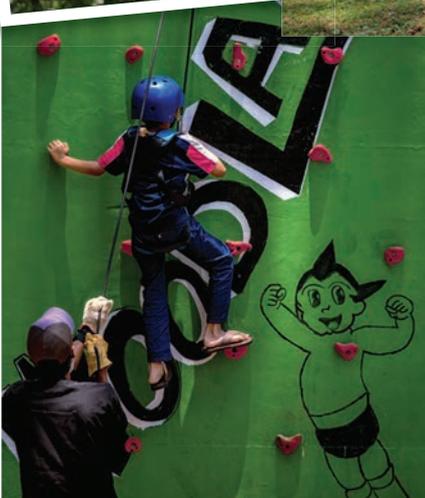
Tempat wisata yang berlokasi di jalur alternatif Kuningan – Cirebon, tepatnya di Desa Setianegara, Kecamatan Cilimus, Kabupaten Kuningan ini cukup viral di media sosial. Foto-fotonya banyak diunggah di Instagram. Pada 2020, Woodland dinobatkan destinasi wisata terbaik urutan kedua di Kabupaten Kuningan, setelah obyek wisata Cibulan dan di atas Zam Zam Pool.

Woodland merupakan sektor usaha yang dikembangkan Pesantren Madinatunnajah yang posisinya berdekatan dengan agrowisata tersebut. Dirintis sejak 2003 oleh pemimpin pesantren, K.H. Mardhani Zuhri, S.Pd.I, M.A, Woodland makin berkembang sejak mendapat Bantuan Program Kemandirian Pesantren dari Bank Indonesia pada akhir 2018 lalu. Bantuan itu berupa dana sekitar Rp59 juta dan pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan keterampilan pengelolanya.

Luas agrowisata ini sekitar 6 hektare. Tiga hektare di antaranya adalah hutan pinus, bagian dari Taman Nasional Gunung Ciremai. “Kalau yang pinus kita bekerja sama dengan Taman Nasional Gunung Ciremai (TNGC), selain itu punya Kyai semua,” kata Ajat Sudrajat, S.Sy, M.Pd, Direktur Harian Pesantren Madinatunnajah, kepada *BICARA*, beberapa waktu lalu.

Woodland yang dilengkapi area parkir lega, masjid, restoran dan kafe ini menawarkan berbagai wahana. Seperti, permainan *outbound*, *flying fox*, sarana berkuada, memanah, dan fasilitas camping. Ada pula kolam renang dan kolam terapi ikan.

Tersedia spot-spot foto seperti jembatan kayu yang dilengkapi dengan lampu-lampu di sepanjang jembatan. Juga spot foto *underwater* di kolam jernih yang dilengkapi properti seperti sepeda, motor, dan komputer. Menariknya, airnya berasal dari mata air yang dipercaya bisa membuat awet muda.



AGROWISATA WOODLAND - PESANTREN MADINATUNNAJAH

Alamat: Jl. Ragasakti No.130 RT 15/RW 05
Dusun Kliwon, Desa Setianegara, Kecamatan
Cilimus, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat

Harga Tiket:

Rp15 ribu (Senin-Jumat)

Rp20 ribu (Sabtu-Minggu), tiket termasuk
berenang dan terapi ikan

Parkir: Rp3.000 (motor) Rp5.000 (mobil)
Rp10.000 (bus)

MENGENAL SEJARAH CIREBON DI KERATON KASEPUHAN

Keraton Kasepuhan menjadi saksi sejarah awal mula terbentuknya Cirebon dan perkembangan Islam di Jawa Barat. Berada di tengah kota, sekitar 3,5 kilometer dari Stasiun Cirebon, Keraton Kasepuhan merupakan satu dari empat keraton di Cirebon. Tiga keraton lainnya yang juga terbuka untuk wisatawan adalah Keraton Kanoman, Keraton Kacirebonan, dan Keraton Kaprabonan.

Sebagai keraton tertua, dan terluas, di Cirebon, Keraton Kasepuhan menjadi salah satu destinasi wisata andalan di Cirebon. Dibangun di lahan 25 hektare, keraton ini menjadi saksi awal mula berdirinya Cirebon dan perkembangan Islam di Jawa Barat. Menghadap utara ke arah alun-alun, Keraton Kasepuhan mempertahankan bangunan aslinya yang sudah berumur ratusan tahun.

Berdasarkan catatan sejarah, Keraton Kasepuhan diawali dengan pembangunan Dalem Agung Pakungwati oleh Pangeran Cakrabuana (putera Raja Pajajaran) pada era Cirebon Nagari, yakni tahun 1430. Posisi bangunan ini berada di bagian timur kompleks keraton saat ini. Pada 1529, Pangeran Mas Zainul Arifin II, cicit Sunan Gunung Jati membangun keraton baru di sebelah barat daya keraton lama.

Keraton Kasepuhan memiliki dua gerbang, Kreteg Pangrawit di utara dan Lawang Sanga di selatan. Bagian depan keraton dinamakan dengan Siti Inggil atau tanah tinggi, yang menghadap langsung ke alun-alun. Siti Inggil memiliki dua gapura dan dikelilingi dinding berwarna merah. Yang unik, pada dinding pagar ditempelkan berbagai keramik dari Tiongkok dan Belanda.

Di dalam Siti Inggil terdapat lima bangunan tanpa dinding, beratap sirap. Tiap bangunan memiliki fungsi dan filosofi tersendiri. "Semua bangunan dibuat pada abad 15, hanya atap sirap yang sudah direnovasi," jelas Elang Hanafi, pemandu wisata di Kasepuhan Cirebon.

Keraton Kasepuhan juga dilengkapi bangunan Museum Pusaka Keraton Kasepuhan yang menyimpan beragam benda pusaka. Yang paling menyedot perhatian adalah kereta kencana Singa Barong, kendaraan Sunan Gunung Jati. Bentuknya gabungan dari gajah, garuda, dan naga.



KERATON KASEPUHAN

Alamat: Jl. Kasepuhan No.43, Kampung Mandalangan, Kelurahan Kasepuhan, Kecamatan Lemahwungkuk, Kota Cirebon, Provinsi Jawa Barat.

Tiket Masuk:

Senin – Jumat (Pelajar Rp10.000, Umum Rp15.000, wisatawan mancanegara Rp50.000)
Sabtu – Minggu (Pelajar Rp15.000, Umum Rp20.000, wisatawan mancanegara Rp70.000)

Jam Buka: 08.00 – 18.00 WIB





BERBURU BATIK DI KAMPUNG TRUSMI

Sejarah batik di Cirebon terentang panjang, yakni sejak abad 14 ketika Ki Gede Trusmi, pengikut Sunan Gunung Jati, mengajarkan seni membatik sembari menyebarkan agama Islam. Dari Desa Trusmi dan desa-desa di sekitarnya (Gamel, Kaliwulu, Wotgalih, Kalitengah dan Panembahan) batik Cirebon terus berkembang.

Memasuki Kampung Batik Trusmi yang ditandai dengan gapura besar dari susunan bata merah khas Cirebon di ujung Jalan Syekh Datul Kahfi, sepanjang mata memandang adalah deretan toko-toko penjual batik. Di antara deretan toko dan butik batik kecil, tampak menonjol bangunan besar pusat penjualan batik, BT Batik Trusmi. Pusat batik ini menawarkan aneka produk batik, mulai dari kain batik, hijab, kemeja, daster, pakaian, mukena, tas, hingga aksesoris bermotif batik. Harganya mulai dari puluhan ribu hingga jutaan Rupiah.

Namun, bila Anda ingin merasakan sensasi berburu batik langsung ke perkampungan perajin, dari BT Batik Trusmi terus saja menyusuri jalan ke arah kanan hingga sampai ke Jalan Buyut Trusmi. Di ruas jalan itu, banyak rumah merangkap *showroom* yang mengerjakan batiknya sendiri. Kita juga bisa melihat aktivitas perajin menjemur kain batik yang baru selesai diproses.

"Sebagian besar warga di sini memang sudah turun temurun menjadi perajin

PUSAT PELATIHAN BATIK SANGGAR BATIK KATURA

Alamat: Jl. Buyut Trusmi No. 5 Plered, Cirebon. Telepon: 0231-322127

Website: www.sanggarbatikkatura.com

Waktu Buka: Senin-Sabtu pukul 08.00 - 16.00 WIB



batik," kata Susi Katura, generasi kedelapan penerus usaha batik di Kampung Trusmi. Susi saat ini mengelola galeri Batik Katura, yang dirintis sang ayah, Katura, sejak 1974. Katura adalah salah satu maestro batik di Trusmi yang kerap mendapat penghargaan.

Berlokasi di gang sempit, Sanggar Batik Katura khusus mengerjakan batik tulis. Setiap hari, kecuali Minggu, kita bisa melihat proses pengerjaan batik di sini. Corak dan kerumitan pengerjaan batik, yang membutuhkan waktu tiga bulan sampai setahun, menjadi penentu harga. Selambar batik tulis dua sisi di atas kain katun premis ukuran 210-260 cm x 105 cm dijual di kisaran Rp3 juta hingga Rp20 juta. Adapun batik bercorak mega mendung yang proses pengerjaannya lebih mudah bisa dibeli seharga Rp1 juta.

Saat memasuki sanggar, tampak papan bertuliskan Wisata Bertanya terpasang di atas pintu masuk. Galeri ini memang memberi ruang bagi kita untuk bertanya banyak hal seputar batik Cirebon, sekaligus berlatih membatik. Cukup membayar Rp50 ribu, selama dua jam Anda akan diajak mengenal lebih dalam sejarah dan proses pembuatan batik sekaligus mempraktikkannya di atas selambar kain seukuran sapu tangan dan hasilnya bisa dibawa pulang.

Ekstotisme Nusantara

dalam **ATMOSFER
KOLONIAL**

BICARA || EDISI 90 TAHUN 2021

KULINER TRADISIONAL
INDONESIA DENGAN BUMBU
REMPAH YANG MELIMPAH
DAN KAYA RASA KERAP
MEMBUAT KANGEN.

FOTO-FOTO MI/PERMANA



Tidak kalah dengan *western food*, masakan tradisional Indonesia menjadi salah satu menu andalan sejumlah restoran premium di Jakarta, termasuk di hotel berbintang lima The Hermitage, a Tribute Portfolio Hotel. Resmi beroperasi pada Juni 2014 lalu, bagian depan hotel bergaya *art deco* ini merupakan bekas gedung pusat telekomunikasi pemerintah kolonial Belanda, *Telefoongebouw*, yang dibangun pada 1923.

Gedung ini sempat beralih fungsi menjadi Universitas Bung Karno, lalu kosong, sebelum akhirnya diambil alih oleh Grace Leo Associates (GLA) Hotels untuk direnovasi menjadi The Hermitage. Tepat di belakang bangunan asli, dibangun gedung baru sembilan lantai dengan desain dibuat semirip mungkin dengan bangunan lama.

Bagi Anda yang ingin merasakan atmosfer kolonial dalam balutan modernitas nan mewah tanpa menghinap, cobalah untuk mengunjungi L'Avenue Restaurant yang terletak di lantai dasar dekat lobi hotel. Di restoran berkonsep *brasserie style* ini, selain masakan *western*,



Anda bisa menikmati beragam kuliner tradisional Indonesia. L'Avenue Restaurant juga istimewa karena menyediakan layanan pembayaran dengan QRIS, sehingga transaksi lebih mudah, cepat, dan aman.

Sambil menunggu hidangan yang dipesan datang, Anda bisa berfoto di sudut-sudut restoran dan hotel yang *instagenic*. Bagi Anda yang ingin merasakan suasana makan yang lebih intim dengan para sahabat atau kolega, tersedia juga *private dining room* berkapasitas 8-10 orang.

Desain interior seperti dinding bercat putih bernuansa klasik dengan langit-langit plafon yang tinggi beserta kipas angin di atap dan lantai marmer. Suasana mewah dan klasik dipertegas dengan adanya furnitur, lampu, lukisan, dan koleksi piring-piring keramik yang menghiasi dinding, serta benda-benda bersejarah lain yang masih terawat membuat pengalaman acara makan menjadi istimewa.

Singkong Istimewa

Untuk memulai petualangan kuliner Anda, cobalah memesan Singkong Goreng Hermitage sebagai menu pembuka. "Ini *signature dish appetizer* di sini," kata Dian Risna Saputri, Public Relations Coordinator

Hermitage.

Singkong yang digoreng coklat keemasan ini disajikan dengan taburan bawang putih goreng dan irisan cabai rawit merah, ditambah *truffle oil* (minyak jamur *truffle*) sehingga menghasilkan rasa yang gurih.

Tekstur singkong gorengnya renyah di luar namun lembut di dalam. Kelembutan ini didapat karena singkong direndam dalam susu sebelum diolah. Rasanya makin lezat saat dipadu dengan adonan saus *mayonaise* pedas. Satu porsi singkong goreng seharga Rp75 ribu ini cukup untuk tiga orang karena ukurannya lumayan besar.

Tradisi Dapur Nusantara

Untuk menu utama, ada beragam hidangan khas Indonesia yang bisa Anda pilih. Ada sop buntut dengan daging yang empuk di dalam kuah bercita rasa rempah kuat. Juga gado-gado yang disajikan lengkap dengan telur mata sapi dan kerupuk gendar. Harga Sop Buntut Rp165 ribu dan Gado-gado Rp115 ribu per porsi.

Ada juga pindang ikan bandeng dengan kuah coklat paduan bumbu rasa pedas, manis, sedikit asam, dan gurih.





Daging ikannya tebal dan lembut, tak meninggalkan jejak amis atau bau tanah sehingga terasa *fresh*. Yang istimewa, saat menyantap pemandangan bandeng ini, Anda tak perlu repot menyisahkan durinya. Satu porsi Pindang Bandeng seharga Rp185 ribu ini ukurannya juga lumayan banyak.

Untuk penggemar tongseng, jangan lewatkan Lamb Shank Tongseng, yaitu tongseng daging domba bagian sengkrel dengan kuah kari yang tidak terlalu kental. Tekstur daging domba bagian sengkrel yang masih melekat di tulangnya itu terasa empuk saat digigit. Kuah bumbu tongseng dengan cita rasa manis sedikit pedas yang meresap ke dalam daging membuat hidangan ini terasa pas di lidah saat disantap dengan sepiring nasi hangat.

Namun yang menjadi *signature dish* alias menu andalan dan favorit pengunjung adalah Nasi Goreng Babi Sambal Matah. Menu yang dibanderol Rp185 ribu ini berupa nasi goreng dengan potongan daging babi di dalamnya, yang disajikan berbentuk tumpeng mini. Beberapa potong daging perut babi (*pork belly*) goreng dilumuri sambal matah serta irisan tomat, ketimun, dan daun selada disajikan sebagai pelengkap. Untuk menjamin kenyamanan pengunjung, peranti yang digunakan untuk memasak nonhalal dipisahkan.

Bagi Anda yang mencari menu nasi goreng lezat tapi halal, tak perlu khawatir. Nasi Goreng Wagyu yang juga jadi menu favorit di sini. Satu porsi nasi goreng dengan campuran potongan daging sapi Jepang yang *juicy* itu disuguhkan lengkap dengan sepotong dada ayam goreng, telur mata sapi, dan dua tusuk satai ayam berukuran besar. Benar-benar mengenyangkan. Untuk menikmatinya, Anda cukup mengeluarkan dana Rp195 ribu.

Jakarta dari Ketinggian

Sebagai pelengkap hidangan, ada beragam minuman yang bisa dipilih. Mulai dari beragam jus buah segar, teh, *soft drinks*, *cocktail*, *mocktail*, hingga kopi. Jika Anda masih punya banyak waktu, sempatkan untuk duduk-duduk santai di *rooftop lounge* hotel yang menawarkan pemandangan panorama Jakarta dengan gedung-gedung pencakar langitnya dari berbagai penjuru. Meskipun tempat ini tidak terlalu besar, tapi bisa menjadi lokasi yang tepat untuk menikmati keindahan *sunset* Ibu Kota dengan segelas minuman dingin.

L'AVENUE RESTAURANT, THE HERMITAGE

Jl. Cilacap No. 1, Menteng, Jakarta Pusat
Instagram: @thehermitagejkt
Buka dari jam 06.30 hingga 22.00 WIB

SEMAKIN DIGITAL

Semakin Inklusif

PELUNCURAN SNAP OLEH BI DIYAKINI AKAN MENJADI AKSELERATOR DIGITALISASI KEUANGAN YANG MEMBAWA MANFAAT BESAR BAGI KALANGAN INDUSTRI MAUPUN MASYARAKAT UMUM.

Penggunaan uang digital semakin meluas. Terlebih sejak pandemi Covid-19 melanda, berbagai layanan menjadi serba digital untuk meminimalkan kontak langsung yang berisiko penularan. Transaksi nontunai bukan lagi soal sosialisasi, melainkan masuk ke ranah inklusi seluruh lapisan masyarakat. Beragam aplikasi uang elektronik yang telah muncul sebelum pandemi semakin unjuk gigi. Salah satunya ditunjukkan oleh penyelenggara jasa pembayaran (PJP) OVO.

Diluncurkan sejak Maret 2017, OVO terus berkembang. Menjalin kemitraan dengan berbagai pihak dan terus berinovasi, pada Oktober 2019 OVO menyandang predikat unicorn dengan nilai sekitar 2,9 miliar Dolar AS.

Seiring dengan perkembangan di sisi industri keuangan digital, Bank Indonesia (BI) sebagai otoritas sistem pembayaran juga menjalankan perannya secara aktif. BI memberi dukungan melalui produk kebijakan yang memungkinkan inovasi terus dilakukan oleh pihak industri, namun dengan tetap memitigasi berbagai risiko yang mengiringi, serta memperkuat perlindungan konsumen.

Yang terbaru, BI meluncurkan Standar Nasional Open API Pembayaran (SNAP) sebagai sarana standardisasi *open API*, teknologi yang menjadi sarana kerja sama antarpelaku keuangan digital. SNAP disusun oleh BI bersama perwakilan industri, termasuk OVO.

Vice President Public Affairs OVO, Sinta Setyaningsih, menyebut SNAP sangat mendukung perkembangan industri

keuangan digital, manfaatnya tidak hanya untuk saat ini, tapi juga di masa mendatang. Lebih lengkapnya, simak bincang-bincang *BICARA* dengan Sinta, berikut ini.

Apa yang melatarbelakangi berdirinya OVO?

OVO ingin menjadi perusahaan teknologi dengan ekosistem terbuka sehingga dapat mendukung terciptanya ekonomi dan keuangan digital yang inklusif. Hal ini tentunya untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan di Indonesia. OVO juga memiliki komitmen untuk terus membantu perekonomian Indonesia, khususnya di masa pandemi seperti saat ini, kami turut membantu pemerintah dalam pemulihan ekonomi nasional dengan melakukan akselerasi transformasi digital.

Apa keunggulan OVO yang menjadikannya berbeda dari aplikasi sejenis?

OVO memberikan produk dan layanan dengan mengedepankan kenyamanan (*convenience*) dan kemudahan bagi *user* maupun *merchant* dalam melakukan seluruh kegiatan/aktivitas ekonomi dan keuangan digital di Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari temuan dari studi yang dilakukan CORE Indonesia dengan OVO beberapa waktu lalu, 55% UMKM menyatakan OVO lebih mudah atau nyaman digunakan. Temuan tersebut juga diperkuat oleh survei Mandiri Institute, sebanyak 72% pelaku UMKM menggunakan OVO sebagai alat pembayaran mereka.



Bagaimana OVO memandang perubahan di masyarakat terkait digitalisasi selama pandemi Covid-19?

Perubahan terjadi didorong oleh perubahan perilaku masyarakat secara perlahan, kegiatan/aktivitas yang biasanya dilakukan secara *offline* menjadi *online* termasuk transaksi jual beli. OVO beradaptasi dengan perubahan perilaku masyarakat tersebut sehingga dampak dari pandemi lebih terukur.

Saat ini sekitar 195 juta atau hampir 200 juta masyarakat Indonesia telah menggunakan *smartphone*. Hal ini sebenarnya bisa menjadi peluang, karena semakin banyak masyarakat yang memanfaatkan teknologi digital, namun di saat yang bersamaan dapat menjadi tantangan untuk menghadirkan produk dan layanan yang terbaik sehingga menjadi pilihan masyarakat luas di tengah kompetisi yang semakin ketat. Tantangan lain adalah melakukan edukasi dan sosialisasi kepada *merchant* OVO, yang lebih dari 90% adalah UMKM, untuk melakukan transformasi digital dengan bergabung bersama ekosistem OVO seperti Grab Indonesia.

Apa saja strategi OVO selama masa pandemi?

OVO fokus dalam mengembangkan layanan pembayaran digital ke depan, karena kami percaya masih banyak inovasi yang dapat diciptakan dari layanan pembayaran digital sebagai pondasinya. Di samping itu, OVO juga akan fokus untuk berkolaborasi dengan berbagai perusahaan lain, baik yang bergerak di sektor keuangan maupun nonkeuangan, untuk terus memperluas ekosistem ekonomi dan keuangan digital demi memberikan kenyamanan dan kemudahan bagi masyarakat Indonesia terutama *para user* dan *merchant*.

OVO juga rutin melakukan edukasi dan sosialisasi kepada *para merchant* maupun masyarakat luas soal manfaat dari digitalisasi ekonomi. Sebagai contoh, beberapa saat lalu bersama Grab Indonesia, OVO meluncurkan program PATRIOT (Program Akselerasi Transaksi Online Pemerintah) yang dimulai di enam pasar tradisional di Solo, Jawa Tengah. Sebagai satu ekosistem, Grab Indonesia dan OVO melakukan edukasi dan sosialisasi terkait pemanfaatan QRIS dan Elektronifikasi Transaksi Pemda (ETP).



Bagaimana perkembangan bisnis OVO pada 2020 dan sepanjang tahun ini?

Pada tahun 2020, TPV (Total Processing Value) OVO sebesar 24% dari total transaksi uang elektronik (total dari *server based* dan *chip based*) di Indonesia. Hal ini membuktikan bahwa OVO adalah penyelenggara uang elektronik yang banyak dipilih oleh masyarakat Indonesia.



OVO merupakan salah satu PJP yang tergabung di dalam Working Group (WG) nasional yang akan menjadi *first mover* dalam mengimplementasi SNAP. Ini adalah sebuah komitmen nyata dari kami untuk BI, karena OVO percaya SNAP akan menciptakan ekosistem ekonomi dan keuangan digital yang sehat dan kondusif bagi pelanggan serta industri.

BI telah meluncurkan SNAP tahun ini. Bagaimana OVO memandang kebijakan BI tersebut?

SNAP merupakan inovasi yang sangat baik dan menjadi langkah besar dari BI demi terwujudnya integrasi, interkoneksi, dan interoperabilitas di industri sistem pembayaran menuju arah yang lebih kolaboratif. OVO percaya SNAP mendukung ekosistem ekonomi dan keuangan digital menjadi lebih cepat, mudah, murah, aman, dan andal.

Apa yang dilakukan OVO untuk mendukung SNAP?

Apa manfaat yang dirasakan OVO dengan adanya SNAP?

Industri *fintech* memiliki karakteristik yang kolaboratif, sehingga hadirnya SNAP mempermudah interkoneksi dan menciptakan ekosistem yang lebih efisien. Selain itu SNAP akan mempercepat proses *time to market* pada industri *fintech* dalam memberikan layanannya, karena SNAP akan mendorong para pelaku industri untuk bersinergi. Semakin banyak pemain yang berkolaborasi semakin luas manfaat yang bisa diberikan.

Bagaimana rencana OVO untuk tahun depan dan dalam lima tahun mendatang?

Industri uang elektronik bukanlah industri yang berdiri sendiri. Agar dapat terus bertumbuh, OVO akan terus berkolaborasi agar menciptakan ekosistem yang lebih lengkap. Dengan demikian, OVO akan menjadi lebih inklusif sehingga dapat menjangkau pasar *underserved/underbanked*. Misalnya melalui kemitraan strategis dengan industri seperti transportasi, *e-commerce*, dan perbankan.

Apakah SNAP akan membantu rencana OVO ke depannya? Bisa dijelaskan seperti apa?

SNAP menawarkan manfaat seperti peningkatan efisiensi serta pengembangan layanan-layanan keuangan yang inovatif dan *customer centric*. Sehingga akan melahirkan berbagai macam inovasi dan model bisnis baru. Dengan adanya efisiensi ini tentu ke depan *resources* yang OVO miliki dapat dialokasikan secara lebih tepat dan akurat.





Salah satu UMKM, Paduzee, menampilkan aneka tas berbalut lurik, salah satu jenis kain dengan motif garis-garis kecil yang merupakan pakaian daerah untuk laki-laki pedesaan suku Jawa. UMKM ini mengusung QRIS sebagai metode pembayaran yang cepat, mudah, murah, dan aman. FESyar Jawa diikuti 90 UMKM syariah di Jawa, terdiri dari 42 UMKM fesyen, 32 UMKM makanan halal, dan 11 UMKM karya wastra.



FESyar 2021 Sinergi Membangun EKSyar Indonesia

FESYAR YANG RUTIN DIGELAR SETIAP TAHUN MENJADI SALAH SATU WUJUD DUKUNGAN BANK INDONESIA MEMAJUKAN EKONOMI DAN KEUANGAN SYARIAH TANAH AIR.

Bank Indonesia (BI) kembali menggelar Festival Ekonomi Syariah (FESyar). Tahun ini, rangkaian kegiatan FESyar diselenggarakan di tiga tempat.

Kegiatan FESyar pertama dilaksanakan di kawasan timur Indonesia (KTI), Provinsi Gorontalo, pada 27 Juli-3 Agustus 2021 secara daring. Mengusung tema “Bersinergi Membangun Ekonomi dan Keuangan Syariah untuk Memperkuat Momentum Pemulihan Ekonomi Melalui Keunggulan Sumber Daya Regional”, FESyar KTI diisi beragam kegiatan antara lain, *business matching*, lomba, seminar, dan forum diskusi.

FESyar berikutnya dilakukan di Sumatra, tepatnya Provinsi Riau, pada 10-15 Agustus 2021 secara virtual. Kegiatan ini bertema “Bersinergi Membangun Ekonomi dan Keuangan Syariah untuk Memperkuat Momentum Pemulihan Ekonomi Melalui Konektivitas Wilayah”. Satu hal yang

istimewa, FESyar Sumatra secara khusus mendorong pemberdayaan wakaf kepada kegiatan produktif dan bernilai ekonomi tinggi yang nantinya berkontribusi bagi inklusi keuangan dan pertumbuhan ekonomi nasional.

Terakhir, FESyar Jawa digelar pada 27 September-2 Oktober 2021 di Jawa Timur. Mengangkat tema “Sinergi Membangun Ekonomi Syariah Melalui Digitalisasi untuk Pemulihan Ekonomi”, FESyar Jawa dilakukan secara *hybrid*, *online* dan *offline*. Kegiatannya mencakup deklarasi Rumah Kurasi untuk penguatan UMKM Syariah, One Pesantren One Produk (OPOP), Himpunan Bisnis Pesantren (Hebitren), hingga deklarasi Kebangkitan Ekonomi Pesantren.

Semua rangkaian kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya BI mendukung upaya Indonesia menuju pusat ekonomi dan keuangan syariah dunia.



Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia, Erwin Haryono, bersama Panglima Komando Tugas Gabungan Terpadu Satgas Covid-19 wilayah Jakarta Raya, Bekasi, dan Tangerang, Pangdam Jaya Mayjen TNI, Mulyo Aji, dalam serah terima bantuan tabung berisi oksigen kepada Rumah Sakit Lapangan Darurat Covid-19 pada Sabtu (6/8) di Jakarta.



Unit tabung berisi oksigen yang bertanda Dedikasi untuk Negeri dengan logo Bank Indonesia diserahkan kepada rumah sakit rujukan Covid-19. Total 5.700 tabung berisi oksigen telah disalurkan ke berbagai fasilitas kesehatan yang menangani pasien Covid-19.

BANTUAN OKSIGEN UNTUK PENANGANAN COVID-19

Bank Indonesia (BI) melalui program Dedikasi Untuk Negeri memberi bantuan sarana/prasarana kesehatan kepada seluruh rumah sakit rujukan Covid-19 di bawah koordinasi Kementerian Pertahanan, Kementerian Kesehatan, dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Dalam komitmen #BeriMakna dengan mengusung semangat *Call for Humanity*, 1.000 unit tabung berisi oksigen dan tiga unit generator oksigen disalurkan. Generator oksigen itu mampu memproduksi oksigen secara mandiri dengan kapasitas 76 tabung per hari.

Selain itu, melalui Kantor Perwakilan, BI juga menyalurkan 2.700 unit tabung berisi oksigen dan generator oksigen kepada sejumlah rumah sakit di Jawa, Bali, dan Kalimantan Tengah. Lebih lanjut, 2.000 unit tabung berisi oksigen, 400

unit konsentrator oksigen, dan 60.000 unit Alat Pelindung Diri (APD) juga telah disalurkan pada Rumah Sakit Lapangan Darurat Covid-19 yang dikelola oleh TNI dan POLRI. Gubernur BI Perry Warjiyo berharap sarana/prasarana itu dapat menunjang fasilitas kesehatan untuk memberikan pelayanan terbaik kepada pasien Covid-19. Dia pun berharap aksi kemanusiaan tersebut dapat tersebar lebih luas untuk mendukung penanganan Covid-19.

BI MENGAJAR TINGKATKAN LITERASI MENEBAR INSPIRASI

Bank Indonesia (BI) kembali menyelenggarakan kegiatan BI Mengajar sepanjang Agustus 2021. Kegiatan tersebut dilaksanakan di lebih dari 50 perguruan tinggi, SMA, serta komunitas. Kegiatan yang dilakukan secara virtual itu melibatkan Dewan Gubernur BI serta jajaran pimpinan BI sebagai narasumber. Dengan tujuan meningkatkan literasi ekonomi dan kebangsaan, termasuk peran dan kebijakan BI, aktivitas edukatif tersebut mengambil tema “Memperkuat Inovasi, Sinergi, dan Kepedulian Sosial Sebagai Kontribusi Bagi Pemulihan Ekonomi Nasional”.

BI Mengajar juga menjadi wujud kontribusi BI terhadap kemajuan pendidikan

dalam rangkaian peringatan HUT ke-68 BI dan HUT ke-76 Republik Indonesia. Gubernur BI, Perry Warjiyo, saat menjadi narasumber mengungkapkan, BI Mengajar bukan hanya untuk meningkatkan literasi melainkan juga menjadi peluang menebar inspirasi dan semangat. Perry membagikan tiga cara untuk semangat menggapai bahagia. Pertama, tetap menggali ilmu tanpa batas waktu. Kedua, perlunya kerja keras dan ikhtiar maksimal. Ketiga, tetap tekun berdoa, berzikir, dan memohon petunjuk kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Sebelumnya, BI Mengajar telah diselenggarakan secara rutin setiap Agustus sejak 2015.



Gubernur Bank Indonesia (BI), Perry Warjiyo, menjadi narasumber dalam BI Mengajar bersama Universitas Diponegoro (Undip) pada Jumat (13/8) secara virtual. Kegiatan itu dihadiri 2.700 peserta dari civitas akademika Undip, perwakilan beberapa perguruan tinggi di Indonesia, dan Generasi Baru Indonesia (GenBI).



Bekerja sama dengan Universitas Mataram, BI Mengajar diselenggarakan secara daring pada Rabu (4/8). Deputi Gubernur BI, Rosmaya Hadi, hadir sebagai narasumber dalam kegiatan yang diikuti oleh 1.706 peserta mahasiswa dan GenBI.



Cicit Cut Meutia, Teuku Adriansyah, semringah menerima kunjungan Bank Indonesia (BI) ke kediamannya. Sebagai generasi penerus, Teuku sangat bangga akan perjuangan mendiang buyut perempuannya itu. Perjuangan Cut Meutia yang begitu gigih melawan penjajah menunjukkan kaum perempuan juga kuat, pantang menyerah, dan mampu menjadi pemimpin.

APRESIASI BI UNTUK PARA PAHLAWAN BANGSA

Perjuangan para pahlawan tidak akan lekang oleh waktu. Berbagai cara dapat dilakukan untuk menunjukkan penghargaan tertinggi bagi para pahlawan. Bank Indonesia (BI) memberikan apresiasi tertingginya dengan menampilkan para pahlawan dalam lembaran Rupiah. Selain itu, setiap bulan kemerdekaan RI, BI juga rutin melakukan kunjungan kepada keluarga keturunan para pahlawan. Tahun ini, kunjungan dilakukan antara lain kepada keluarga cicit Cut Meutia, cucu MH Thamrin, dan anak Syafruddin Prawiranegara.

Cut Meutia dikenal sebagai perempuan dari Aceh yang berani menyerang dan merampas pos-pos kolonial Belanda.

Dia pun tidak takut menelusuri hutan belantara. Cut Meutia gugur dalam pertempuran di Alue Kurieng bersama pasukannya pada 1910. Adapun Mohammad Husni Thamrin (MH Thamrin) menjadi salah satu tokoh yang memprakarsai gerakan politik mendorong kemerdekaan Indonesia.

Cita-cita memiliki mata uang bangsa sendiri diungkapkan Syafruddin Prawiranegara kepada Presiden Soekarno setelah Indonesia merdeka. Ia menegaskan, mata uang Rupiah merupakan simbol bahwa Indonesia benar-benar telah merdeka. Mantan Menteri Keuangan di Kabinet Hatta II ini merupakan Gubernur BI pertama.



Keluarga keturunan pahlawan nasional MH Thamrin menerima cendera mata dari BI berupa replika uang Rupiah yang menampilkan sosok MH Thamrin.

Replika Uang Peringatan Kemerdekaan 75 Tahun RI menjadi salah satu cendera mata yang diberikan BI kepada keluarga keturunan pahlawan nasional Sjafruddin Prawiranegara.



Standar Nasional Open API Pembayaran (SNAP) yang diluncurkan Bank Indonesia (BI) pada 17 Agustus 2021 lalu ditujukan untuk menciptakan industri sistem pembayaran yang sehat, kompetitif, dan inovatif sehingga dapat menyediakan layanan sistem pembayaran kepada masyarakat yang efisien, aman, dan andal. SNAP wajib diterapkan secara bertahap dalam setiap API pembayaran. BI pun telah mengembangkan *developer site* SNAP yang dapat diakses melalui website www.bi.go.id untuk memudahkan industri dalam menerapkan SNAP.

@enadzifk Baru baca ini. Keren banget sih ini kalo sudah berjalan. BI Josgandos.

@furqonagry Open API ini bisa jadi waktu yang tepat ini untuk kolaborasi *fintech* & perbankan. Ga sabar buru2 dilaksanain tahun 2022.

@metriacicilia Keren! *Let's go digital!!*

@wilyrahadyan Wah open API kalau benar-benar terwujud, makin oke & menguntungkan nih dari segi efisiensi kita sebagai konsumen.

@astarins *Can't wait!* Semoga open API jadi loncatan yang positif menuju Blue Print Sistem Pembayaran 2025. Nanti bisa sinergi antara PJSP dgn perbankan.

@made_julyanita07 *ebank_Indonesia* makin kereenn.



LOMBA FOTO

Hati siapa yang tak bersuka ketika impian memiliki rumah idaman akhirnya terwujud. Saat pengajuan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dikabulkan, senyum pun lepas terkembang. Benar-benar sebuah *moment* tak terlupakan!

Nah, Sobat Rupiah punya pengalaman membahagiakan itu? Ayo, ikuti Lomba Foto "Ekspresi Saat KPR Pertama Terwujud", caranya:

1 FOTO EKSPRESI SOBAT RUPIAH KETIKA BERHASIL MENDAPATKAN KPR PERTAMA.

2 UNGGAH FOTO DISERTAI CAPTION MENARIK DI AKUN INSTAGRAM KALIAN, JANGAN LUPA SERTAKAN HASHTAG #LOMBAFOTOBICARA.

3 MENTION DAN TAG AKUN INSTAGRAM @bank_indonesia.

Foto para pemenang terpilih akan ditampilkan pada Majalah *BICARA* Edisi 91. Tersedia hadiah menarik untuk para pemenang terpilih.



Tebak-Tebakan Negara

KRIUK!

Didot: Jane, tebak ya

Jane: Tebak apa?

Didot: Kenapa di Indonesia orang sering tanya 'kapan nikah'?

Jane: Curhat ya Dot? Hahaha. Kebiasaan dari dulu kali apalagi buat kita-kita

Didot: Salah! Karena Indonesia negara *marry time*

Jane: Maritim kali hahaha

Didot: Satu lagi nih Jane

Jane: Apa tuh?

Didot: Nonton film *Frozen* kan Jane?

Jane: Iya Dot, *gegara* keponakanku suka nonton

Didot: Nah, harusnya tahu nih. Kenapa di film *Frozen* karakter Ana dan Elza tinggal di Norwegia?

Jane: Hmmm kenapa ya? Emang ceritanya begitu kali Dot

Didot: Ya, karena kalau tinggal di Arab namanya Ana dan Ente, Jane

Jane: Capek deeeh...

Didot: Hahahahaha

Jane: Giliranku ya. Negara, negara apa yang selalu siaga sama hujan?

Didot: Ah gampang! Swedia payung sebelum hujan!

Jane: Yaaah ketebak banget ya...



Bang Sen



Lebih Mantap dengan SNAP



Open API itu yang bikin bank/penyedia jasa pembayaran lainnya bisa terhubung dengan berbagai e-commerce. Lebih kerennya lagi, Open API ini udah terstandarisasi oleh Bank Indonesia dalam Standar Nasional Open API Pembayaran (SNAP) yang bikin infrastruktur sistem pembayaran lebih aman dan andal!



Wow cool! Kayaknya hati aku juga butuh standarisasi nih.



Halo, saya LISA!

(Layanan Informasi Bank Indonesia)

Jangan ragu untuk menghubungi saya ya!

 081 131 131 131

 @BankIndonesiaOfficial

 @bank_indonesia



Kenal Lebih Dekat Dengan SNAP

(Standar Nasional Open API Pembayaran)



SCAN QR CODE
UNTUK MENGIKUTI
SURVEI PEMBACA DAN
DAPATKAN SALDO
OVO/GOPAY